

Laporan Penelitian

PARTISIPASI POLITIK JAWA TENGAH



Dr. Abdul Jalil, S.Ag., M.EI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JAWA TENGAH

2016

KATA PENGANTAR

Ungkapan kalimat syukur keharibaan Allah tak pernah mengering atas segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menuangkan hasil penelitian tentang istri shalihah dalam perspektif fiqh terapan.

Terselesaikannya penelitian ini tak terlepas dari kebaikan semua pihak, baik berupa dorongan, bimbingan, arahan, saran, dan doa maupun fasilitas. Untuk semua kebaikan selayaknyalah kami ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P.
2. Kepala Kesbangpol Jateng, Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si
3. Civitas Akademik IAIN Kudus, khususnya teman-teman pascasarjana IAIN Kudus
4. Teman-teman yang ikut terlibat dalam diskusi sehingga penulis mendapat inspirasi.

Mereka menyadarkan penulis akan arti pentingnya kebersamaan. Penulis menyadari bahwa disertasi ini jauh dari sempurna, dan dalam banyak hal memendam kekurangan. Oleh karena itu saran yang konstruktif sangat penulis butuhkan demi tercapainya suatu kesempurnaan. Meskipun demikian, semoga hadirnya laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait.

Kudus, 19 Agustus 2016

Penulis.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

SURAT KETERANGAN

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah mengesahkan laporan penelitian:

Judul Penelitian : Partisipasi Politik Jawa Tengah
Peneliti : Dr. Abdul Jalil, M.E.I
NIP : 197206192000031002
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/IVa
Perguruan Tinggi : IAIN Kudus
Tahun Pelaksanaan : 2016
Biaya : 30.000.000
Sumber : Anggaran Kesbangpol Jawa Tengah

Semarang, 22 Agustus 2016



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH**

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19591202 198203 1 005

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| SAMPUL DEPAN | i |
| SAMPUL DALAM | ii |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR TABEL | |
| | |
| Bab I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | |
| C. Tujuan Penelitian | |
| D. Kegunaan Penelitian | |
| E. Sistematika Penulisan | |
| | |
| Bab II : LANDASAN TEORI | |
| A. Partisipasi Politik | |
| B. Teori Umum Perilaku Pemilih | |
| C. Faktor yang Mempengaruhi Partipasi Politik | |
| | |
| Bab III : METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Penelitian | |
| B. Populasi | |
| C. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data | |
| D. Analisis Data | |
| | |
| Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian | |
| B. Partisipasi Politik Jawa Tengah | |
| | |
| Bab V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | |
| B. Saran dan Rekomendasi | |

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kita, Indonesia, semenjak merdeka menerapkan asas demokrasi dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini salah satunya agar seluruh elemen masyarakat mendapatkan hak yang sama di mata hukum. Menurut *Hannry B. Mayo*, demokrasi merupakan suatu kebijaksanaan umum yang ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana dimana terjadi kebebasan politik.¹

Dari rumusan tersebut, paling tidak, suatu negara yang menganut sistem demokrasi memiliki: (1) suatu sistem pemerintahan yang mempunyai elemen-elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, (2) orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakkan hukum, dan (3) kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian besar warga negara dewasa.

Dengan kata lain demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibentuk melalui pemilihan umum untuk mengatur kehidupan bersama berdasar aturan hukum yang berpihak pada rakyat banyak. Dari pemahaman terkait demokrasi di atas, maka pilihan terhadap negara demokrasi akan mempunyai konsekuensi yang harus diperhatikan, yakni memberikan kesempatan kepada rakyat selaku warga negara untuk menjalankan hak dan kewajiban politiknya dalam bernegara. Dikemukakan oleh Robert A. Dahl dalam *On Democracy*, bahwa “*democracy provides opportunities for effective participation; equality in voting; gaining enlightened understanding; exercising final*

¹ Henry B. Mayo, 1960, *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press, hlm. 70

control over the agenda; inclusion of adults". Artinya, bahwa dengan demokrasi akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk partisipasi yang efektif; persamaan dalam memberikan suara; mendapatkan pemahaman yang jernih; melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda; dan pencakupan warga dewasa. Konsekuensi demokrasi tersebut akan memberikan standar ukuran umum dalam melihat suatu negara sebagai negara demokrasi.²

Secara kelembagaan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan Indonesia terdiri atas presiden sebagai kepala Negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan Indonesia yang dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Presiden sebagai kepala pemerintahan Indonesia memegang kekuasaan eksekutif dalam Negara Indonesia karena melaksanakan amanat dari rakyat selama 5 tahun. Oleh karena itu, kursi presiden menjadi kedudukan yang sakral di Indonesia.

Pemilu di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1955 untuk memperebutkan kursi di MPR dan Konstituante. Pemilu ini merupakan satu-satunya pemilu yang dilakukan pada zaman orde lama. Pada masa orde baru dan awal masa reformasi presiden dipilih melalui musyawarah MPR, hal itulah yang menyebabkan alm. Soeharto berhasil menjabat sebagai presiden selama 31 tahun. Namun pada tahun 2004 dilakukan pemilihan umum presiden untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Presiden dan Wakil presiden terpilih memegang jabatan selama 5 tahun atau 1 periode, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode, sesuai perubahan pertama UUD 1945 pasal 7. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (atau sering dikenal dengan sebutan SBY) merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2004, dan melanjutkan masa jabatannya hingga tahun 2014, karena pada tahun 2009 memenangkan pemilu untuk kedua kalinya. Sesuai dengan UUD tersebut, pada pemilu 2014 presiden SBY tidak dapat mengikuti pemilihan presiden lagi. Sehingga

² Robert A. Dahl, 1998, *On Democracy*, USA; Yale University Press, hlm. 38

pemilihan presiden pada tahun 2014 akan menentukan presiden kedua hasil pilihan rakyat secara langsung.

Pada pemilihan umum 2014, tahap pelaksanaan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Pemilihan legislatif tahun 2014 bertujuan untuk memilih perwakilan-perwakilan rakyat di DPD, DPRD, dan DPR. Pemilu legislatif 2014 diikuti oleh 12 partai politik ditambah 3 partai politik untuk provinsi NAD. Pemilihan umum anggota legislatif merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (legislatif) baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada dasarnya, kehadiran Negara adalah untuk menjamin dan memfasilitasi warga Negara menuju pada kesejahteraan dan perdamaian. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah berkewajiban mengatur dan mendorong masyarakat menuju cita-cita tersebut. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah adalah melalui pembangunan.

Pembangunan suatu Negara dilaksanakan tak lain adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Dalam mencapai tujuan ini, juga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, agar hasil pembangunan dan program-program pemerintah lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, faktor penting kaitannya dengan pembangunan adalah

partisipasi aktif dari seluruh masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan modal pokok dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah, termasuk di dalamnya adalah program pembangunan pemerintah Jawa Tengah. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Lebih dari itu, dikeluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian diperbarui dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah menjadikan partisipasi masyarakat mendapatkan tempat yang semestinya. Paradigma birokrasi yang dulunya sentralistik, kini menjadi desentralistik. Pada kenyataannya desentralisasi diminati banyak orang karena di dalamnya terkandung semangat demokrasi, yang ujungnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.³

Sejak tahun 1999 dikeluarkan berbagai instrument hukum berupa undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang membuka lebar ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan monitoring pembangunan. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana. Selain undang-undang

³ Syaiful Arif, 2006, *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*, Malang: Averroes Cipta, hlm. 23

nomor 32 tahun 2004, berbagai peraturan yang secara sektoral memberikan ruang bagi partisipasi publik diantaranya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dan masih banyak lagi peraturan yang secara sektoral mengatur partisipasi masyarakat. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik dan implementasinya.⁴

Aspek penting lain yang membutuhkan partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam politik. Konsep partisipasi politik (*polytical participation*) secara singkat biasanya dipahami sebagai keikutsertaan warga negara dalam proses-proses politik secara sukarela. Kata warga negara di sini merujuk pada individu atau mungkin kelompok-kelompok dalam masyarakat yang bukan orang-orang yang duduk dalam lembaga-lembaga resmi seperti parlemen, jaksa, atau hakim. Kemudian keikutsertaan dalam proses-proses politik pada dasarnya adalah upaya memberikan tanggapan, saran, atau mengemukakan aspirasi-aspirasi atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan penjatahan sumber daya publik. Karena itu partisipasi politik memiliki karakter pokok bahwa keikutsertaannya didasarkan pada prinsip sukarela bukan paksaan.⁵

Menurut Prof. Damsar (2010), partisipasi dimengerti sebagai berperan serta atau ikut serta. Dalam konteks politik, partisipasi ini dimaknai sebagai turut serta dalam politik. Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara

⁴ *Ibid.*, hlm 34

⁵ Pawito, 2009, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, Yogyakarta, hlm 39-41

dalam membuat keputusan, melaksanakan keputusan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk yang berkaitan dengan keterlibatan aktif maupun keterlibatan pasif setiap individu dalam hierarki sistem politik.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Secara umum masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Modernisasi telah menghasilkan partisipasi politik yang meluas. Partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.⁶

Konsep partisipasi politik (*polytical participation*) secara singkat biasanya dipahami sebagai keikutsertaan warga negara dalam proses-proses politik secara sukarela.⁷ Kemudian keikutsertaan dalam proses-proses politik pada dasarnya adalah upaya memberikan tanggapan, saran, atau mengemukakan aspirasi-aspirasi atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan penjatahan sumber daya publik.

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct actionnya*, dan sebagainya.

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat:

⁶ Sudijono Sastroatmodjo, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang, IKIP Semarang Press, hlm. 67

⁷ Pawito, *Op. Cit*, hlm 222

Pertisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).⁸

Hal yang paling disoroti adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

Sedangkan menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science*:

Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. (*By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take*)⁹

Dalam hubungan dengan negara-negara baru Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* memberi penafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan.

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. (*By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*).¹⁰

⁸ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, ed.revisi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 367

⁹ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 2

Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu, dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang kursi pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan wujud dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik seperti memberikan suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari yang berwenang untuk membuat keputusan mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*).

Banyak kegiatan publik, baik yang berdimensi politik maupun nonpolitik, dapat terselenggara dengan baik karena adanya peran serta atau keikutsertaan warga. Fakta bahwa dalam berbagai kegiatan pemilihan umum seperti Pemilu legislatif, Pilpres, Pilkada maupun pemilihan kepala desa, warga merancang tempat dan lokasi pemilihan sedemikian rupa supaya warga tertarik datang ke tempat pemungutan suara, maka kegiatan-kegiatan seperti ini dimengerti sebagai partisipasi. Lebih-lebih pemberian suara (voting) dalam pemilu merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar.

Pada aspek pelaksanaannya, demokrasi di Indonesia saat ini terus berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi semakin tampak terlihat jelas. Partisipasi masyarakat dalam politik sebagai salah satu petunjuk dan indikator bahwa demokrasi di negeri ini semakin tumbuh dan berkembang.

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi di negeri ini. Penyelenggaraan pemilu secara periodik sudah

¹⁰ Miriam Budiardjo, 2008, *Op.cit*, hlm. 368

berlangsung secara baik sejak awal kemerdekaan bangsa ini. Akan tetapi, proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu 2004 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman. Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan pemilu 2004 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan chaos menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini. Kesuksesan ini, tentunya ditopang dengan partisipasi masyarakat yang cukup besar.

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Hal ini karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan, dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan walikota dan bupati dilakukan secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut.

Belajar dari beberapa negara berkembang, Oakley mengartikan partisipasi ke dalam tiga bentuk, yaitu (1) partisipasi sebagai kontribusi (2) partisipasi sebagai organisasi, dan (3) partisipasi sebagai pemberdayaan.

Kontribusi, yaitu keterlibatan secara sukarela atau bentuk kontribusi lainnya dari masyarakat dalam program pembangunan. Sedang organisasi sampai saat ini masih ada perdebatan antara praktisi dan teoritis mengenai organisasi sebagai instrumen yang fundamental bagi partisipasi. Namun dapat dikemukakan bahwa perbedaan organisasi dan partisipasi terletak pada hakekat bentuk organisasi sebagai sarana bagi partisipasi, seperti organisasi-organisasi yang biasa dibentuk atau organisasi yang muncul dan dibentuk sebagai hasil dari adanya proses partisipasi.

Partisipasi sebagai pemberdayaan dimaknai sebagai wahana pemberdayaan bagi masyarakat, meskipun sulit didefinisikan. Akan tetapi, pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.¹¹

Dalam perkembangannya, konsep partisipasi memiliki pengertian yang beragam walaupun dalam beberapa hal memiliki persamaan. Menurut Gaventa dan Valderama dalam Tjipto Amoko menyatakan bahwa dalam pembangunan yang demokratis, terdapat tiga tradisi partisipasi yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial dan partisipasi warga.

Partisipasi politik adalah interaksi individu atau organisasi politik dengan Negara yang diungkapkan melalui tindakan terorganisir melalui pemungutan suara, kampanye, dan protes dengan tujuan mempengaruhi wakil-wakil pemerintah. Sementara, partisipasi sosial diartikan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai pewaris pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan disemua tahapan siklus pembangunan. Sedangkan partisipasi warga diartikan sebagai suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Eko Sutoro dalam Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, substansi partisipasi sesungguhnya adalah voice, akses, dan kontrol. Voice merupakan hak dan tindakan warga masyarakat dalam mencari informasi, menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Voice dapat disampaikan warga dalam banyak cara diantaranya: opini publik, referendum, media masa, berbagai forum warga.

Sedangkan akses mengandung arti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area *governance* yakni mempengaruhi dan menentukan

¹¹ Oakley, Peter, et al. 1991. *Projects With People, The Practice Of Participation in Rural Development*, Geneva : International Labour Office. Hlm. 1-10

kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses yaitu: keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). Keduanya mempunyai persamaan tetapi berbeda titik tekannya. *Inclusion* menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Dan kontrol, merupakan upaya masyarakat merespon terhadap lingkungan komunitasnya maupun kebijakan pemerintah. Kita mengenal kontrol internal (*self-control*) dan kontrol eksternal (*external control*). Artinya kontrol atau pengawasan bukan saja kontrol terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, tetapi juga kemampuan warga untuk melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap lingkungan dan perbuatan yang dilakukan mereka sendiri.

Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam politik begitu beragam. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan yang ada dalam diri tiap manusia, seperti tingkat pendidikan, penghasilan dan pekerjaan anggota masyarakat. Menurut Soemanto R B, mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih tinggi derajat partisipasinya, hal itu karena dibawa oleh semakin kesadarannya.

Faktor pendidikan juga berpengaruh pada perilaku seseorang dalam menerima dan menolak suatu perubahan yang dirasakan baru. Masyarakat yang berpendidikan ada kecenderungan lebih mudah menerima inovasi jika ditinjau dari segi kemudahan (*accessibility*) atau dalam mendapatkan informasi yang mempengaruhi sikapnya. Seseorang yang mempunyai derajat pendidikan mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam menjangkau sumber informasi. Oleh karena itu, orang yang mempunyai pendidikan kuat akan tertanam rasa ingin tahu sehingga akan selalu berusaha untuk tahu tentang inovasi baru dari pengalaman-pengalaman belajar selama hidup.

Faktor penghasilan merupakan indikator status ekonomi seseorang, faktor ini mempunyai kecenderungan bahwa seseorang dengan status ekonomi tinggi pada umumnya status sosialnya tinggi pula. Dengan kondisi semacam ini mempunyai peranan besar yang dimainkan dalam masyarakat

dan ada kecenderungan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan terutama gejala ini dominan di masyarakat pedesaan.

Pengaruh ekonomi jika diukur dalam besarnya kontribusi dalam kegiatan pembangunan ada kecenderungan lebih besar kontribusi berupa tenaga. Dalam hubungannya partisipasi orang tua siswa dalam membantu pengembangan proses pembelajaran pada tahapan pelaksanaan, faktor penghasilan mempunyai peranan, karena untuk melaksanakan inovasi membutuhkan banyak modal yang sifatnya lebih intensif.

Faktor lain disampaikan oleh Angell, menyatakan, partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan lamanya tinggal.

Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

Jenis kelamin laki-laki dan perempuan juga menjadi salah satu penentu. Sebab, nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur”. Ini berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Sedang pekerjaan dan penghasilan akan begitu menentukan. Berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam

kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian. Dan, lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Di Indonesia, partisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, dan hak mendapatkan keadilan.

Kesadaran politik ini, pada akhirnya akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa. Politik adalah pengaturan urusan masyarakat melalui kekuasaan. Kekuasaan diperoleh dari rakyat melalui pemilihan. Ini berarti yang akan menduduki tampuk kekuasaan ditentukan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga merupakan lahan tempat lahirnya para pemimpin. Oleh karena itu, kualitas masyarakat akan menentukan kualitas penguasa yang terpilih.

Di sinilah pentingnya mencerdaskan masyarakat dengan membangun kesadaran politik. Adanya kesadaran politik berarti adanya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pengaturan urusan mereka; aturan seperti apa dan siapa yang akan menjalankan aturan tersebut. Masyarakat tidak akan tertipu lagi janji-janji palsu yang ditebar calon penguasa saat kampanye, apalagi sampai menggadaikan hak pilih hanya untuk selembar baju kaos murahan, uang makan siang atau sembako. Lebih dari itu, partisipasi

masyarakat dalam politik, pada akhirnya akan menggerakkan masyarakat pada partisipasi pembangunan, karena ketika masyarakat telah berduyun-duyun mengangkat seorang pemimpin yang dipercayai, maka tentu kemudian diharapkan masyarakat akan terus mengawal kebijakan dan jalannya pemerintahan pemimpin tersebut.

Di Jawa Tengah, partisipasi masyarakat dalam bidang politik merupakan isu penting yang harus mampu dijawab oleh pemegang kebijakan. Jawa Tengah menjadi bagian penting dalam era demokrasi di negeri ini. Dalam masa otonomi daerah saat ini setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi sebagai upaya yang tepat untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial, sehingga meskipun terdapat perbedaan-perbedaan antar daerah yang disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana, faktor geografis seperti perbedaan kesuburan tanah maupun kondisi daerah, hal tersebut tidak akan mengakibatkan perbedaan dalam kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota. Berdasarkan survey daya saing yang dilakukan oleh Budi Santoso Foundation, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah, Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia Semarang dan Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) tahun 2010 dengan 6 indikator yaitu iklim bisnis, kinerja pemerintah, infrastruktur, kinerja ekonomi, kinerja investasi, dan dinamika bisnis, kota-kota di Jawa Tengah tidak seluruhnya menduduki peringkat unggul.

Dari sisi perekonomian daerah yang akan menentukan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, salah satunya dapat diketahui dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di

suatu wilayah. Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah memperoleh pendapatan paling unggul dimana pendapatannya pada tahun 2012 sebesar 91.282.029,07 juta rupiah, tahun 2013 sebesar 97.340.978,65 juta rupiah, dan tahun 2014 sebesar 102.501.385,64 juta rupiah. Jumlah tersebut merupakan pendapatan tertinggi bila dibandingkan dengan daerah kota maupun daerah kabupaten di Jawa Tengah. Pendapatan kedua oleh kabupaten Cilacap dengan pendapatannya pada tahun 2012 sebesar 79.702.237,61 juta rupiah, tahun 2013 sebesar 81.369.806,41 juta rupiah, dan tahun 2014 sebesar 83.775.740,98 juta rupiah. Sedangkan pendapatan terendah adalah kota Magelang dimana PDRB nya pada tahun 2012 sebesar 4.484.268,08 juta rupiah, tahun 2013 sebesar 4.755.269,18 juta rupiah, tahun 2014 sebesar 4.987.376,44 juta rupiah.

Sementara itu, dari sisi partisipasi politik masyarakat Jawa Tengah, partisipasi masyarakat yang menggunakan hak suaranya dalam pemilu cukup baik. Dari data yang dirilis KPU Jawa Tengah, Secara umum partisipasi masyarakat Jawa Tengah terhadap demokrasi di negeri ini tidak buruk. Keikutsertaan masyarakat untuk memilih dalam pemilu dan pilkada selama ini berada pada tingkat sedang. Dari data yang dilansir dari KPU Jawa Tengah, sejak pileg tahun 2004 hingga pilkada serentak 2015, partisipasi masyarakat terendah yakni sebanyak 57,15% pada saat Pilgub tahun 2013, sedangkan yang tertinggi yakni di angka 83,50 % yang terjadi pada tahun pemilihan legislatif (pileg) tahun 2004.

Tabel Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Jawa Tengah

| NO | KEGIATAN | PARTISIPASI |
|----|-------------------|-------------|
| 1 | Pileg 2004 | 83.50 % |
| 2 | Pilpres 2004 (1) | 80.37 % |
| 3 | Pilpres 2004 (2) | 77.37 % |
| 4 | Pilkada 2005-2006 | 70.55 % |
| 5 | Pilgub 2008 | 59.44 % |
| 6 | Pileg 2009 | 72.43 % |

| | | |
|----|-------------------------|---------|
| 7 | Pilpres 2009 | 72.00 % |
| 8 | Pilkada (1) 2010 - 2013 | 61.58 % |
| 9 | Pilkada (2) 2010 – 2013 | 57.99 % |
| 10 | Pilgub 2013 | 57.15 % |
| 11 | Pileg 2014 | 74.72 % |
| 12 | Pilpres 2014 | 72.62 % |
| 13 | Pilkada 2015 Serentak | 68.54 % |

Sumber data: KPU Jawa Tengah

Secara khusus, KPU Kabupaten demak juga telah melakukan penelitian tentang pileg dan pilpres tahun 2014 di daerahnya. Dari hasil riset KPU kabupaten Demak menyebutkan, kendati partisipasi pemilih pada pileg 2014 sedemikian besar telah berhasil melampaui target yaitu sebanyak 78%, tetapi faktor yang memengaruhi pemilih masih banyak masuk kategori pemilih transaksional. Dari survei yang telah dilakukan, sebanyak 52% pemilih masuk dalam kategori pemilih transaksional (memilih karena imbalan uang/barang). Sedangkan pemilih emosional (memilih karena ikatan separtai, seormas, sekeluarga, sekomunitas) juga masih tinggi yaitu 33%, adapun yang masuk kategori pemilih rasional (memilih karena visi, misi dan program kerja) cuma 15%.¹²

Data yang hampir sama juga diperlihatkan di kabupaten Pati. Dari survey yang telah dilakukan KPU kabupaten Pati, faktor politik masih dominan menjadi penentu pilihan masyarakat. Sikap masyarakat Pati terhadap politik uang bukanlah masalah pengetahuan, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam bentuk suap pada masa pemilihan untuk mempengaruhi *voter* dalam memilih. Strategi untuk mengurangi penggunaan suap dalam pemilihan dengan sosialisasi tidaklah berpengaruh, karena berdasarkan data empiris, faktor kognitif tidak berkorelasi signifikan terhadap keputusan pemilih untuk berpartisipasi atau menentukan pilihannya.

¹² KPU Demak, 2015, *Evaluasi Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Legislatif Dan Presiden Tahun 2014 Serta Menyongsong Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2015*, Demak, hlm. 35

Jargon khas dari masyarakat Kabupaten Pati yang selama ini sudah mengakar di setiap hajatan pemilihan umum adalah “ora uwek ora obos” (tidak ada uang tidak mencoblos atau memilih). Jargon tersebut seolah menjadi cerminan bagaimana tradisi pemilu di Kabupaten Pati selalu identik dengan keberadaan politik uang. Akibatnya pola tersebut sudah dianggap sebagai sebuah kewajaran, dan akan menjadi “aneh” manakala dalam kegiatan politik tidak ada politik uang, sehingga siapapun harus menyiapkan dana melimpah jika ingin maju menjadi kontestan politik.

Dua data partisipasi politik masyarakat di kabupaten Demak dan kabupaten Pati sebagaimana yang di sebut di atas erat kaitannya dengan faktor ekonomi. Selain itu bila dibandingkan dengan data PDRB kabupaten, maka daerah Demak dan Pati merupakan daerah-daerah dengan PDRB rendah. Kabupaten Demak pada tahun 2012 memiliki PDRB 12.823.227,04 juta rupiah tahun 2013 berjumlah 13.499.226,47 juta rupiah dan tahun 2014 memiliki PDRB 14.075.691,75 juta rupiah. Sedangkan kabupaten Pati juga masuk dalam PDRB rendah dengan PDRB tahun 2012 sebesar 21.072.328,70 juta rupiah, tahun 2013 sebesar 22.314.753,78 juta rupiah dan tahun 2014 memiliki PDRB sebesar 23.327.059,31 juta rupiah.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar pemikiran di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat Jawa Tengah?
2. Faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab tentang :

1. Mendeskripsikan sejauh mana tingkat partisipasi pembangunan masyarakat Jawa tengah.

2. Mendeskripsikan faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Jawa tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, yakni memberikan data dan gambaran yang berguna tentang tingkat partisipasi dan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Jawa Tengah dalam politik.
2. Secara akademis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak bagi kepastakaan. Lebih dari itu, penelitian diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah tentang rencana kebijakan yang akan diambil dalam kaitannya dengan pembangunan dan politik di Jawa Tengah.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai tingkat partisipasi masyarakat Jawa Tengah terkait partisipasi politik.

Oleh karenanya, penelitian ini akan ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada dasarnya bab dua ini merupakan landasan teori terhadap Pembahasan partisipasi politik

Bab III : Metodologi Penelitian

Dalam bab ini, jenis dan pendekatan penelitian, populasi

dan sampel, teknik pengumpulan data serta analisis data..

Bab IV : Analisis Hasil Penelitian

Bab keempat ini merupakan pendeskripsian data penelitian dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisis dari hasil penelitian dan data-data yang telah terkumpul.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran yang dianggap penting dan relevan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, *participation* yang artinya pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi diartikan, perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Menurut Fasli Djalal dan Dedi Supriadi partisipasi diartikan sebagai upaya pembuat keputusan untuk menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.¹ Dalam hal ini, kelompok tersebut mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R. Tilaar menyatakan, partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*button-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Sedang menurut Soegarda Poerbakawatja partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.²

Ilmuwan Keith Davis mendefinisikan, partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumba-

¹ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks. Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita, hlm. 201-202

² Soegarda Poerbakawatja, 1981, *Ensiklopedia Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 251

ngan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Seseperti dengan uraian di atas, Gordon W. Allport menyatakan bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya.³

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi yaitu:

- a. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
- b. Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
- c. Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja. Ketiga unsur partisipasi di atas tidak akan terpisahkan satu sama lain, tetapi akan saling menunjang.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. Berdasarkan keterlibatannya, menurut Sundariningrum partisipasi dibagi atas dua macam, yaitu partisipasi langsung, yakni apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi, seperti mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Kedua,

³ Santoso Sastropoetro, 1988, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, hlm., 12

partisipasi tidak langsung, yakni partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Menurut Effendi partisipasi terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.⁴

Menurut Kokon Subrata, bentuk partisipasi terdiri dari beberapa hal yaitu:

- a. Turut serta memberikan sumbangan finansial.
- b. Turut serta memberikan sumbangan kekuatan fisik.
- c. Turut serta memberikan sumbangan material.
- d. Turut serta memberikan sumbangan moril (dukungan, saran, anjuran, nasehat, petuah, amanat, dan lain sebagainya).

3. Manfaat Partisipasi

Secara umum, partisipasi membawa efek manfaat yang baik. Ungkapan “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” agaknya sesuai dengan konteks partisipasi ini. Artinya semakin tinggi partisipasi dari masyarakat banyak, hasilnya akan positif dan semakin bermanfaat. Menurut Pariatra Westra, manfaat yang diperoleh dari partisipasi adalah:

- a. akan diperoleh keputusan yang benar.
- b. dapat menggali kemampuan berpikir kreatif dari para anggotanya.
- b. mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun kepentingan bersama.
- a. Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab.
- b. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan.

⁴ Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, hlm. 58

Melengkapi pendapat di atas, Burt K. Schalan dan Roger, mengemukakan manfaat dari partisipasi adalah lebih banyak komunikasi dua arah, lebih banyak bawahan mempengaruhi keputusan, dan yang terpenting adalah potensi untuk memberikan sumbangsaih yang positif dapat diakomodir dan diakui.

Dari pendapat-pendapat di atas, secara kongkrit, partisipasi akan memberikan manfaat yang penting bagi keberhasilan organisasi ataupun pemerintahan. Bila dirinci akan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar karena banyaknya sumbangan yang berarti dan positif.
- b. Mengedepankan komunikasi dua arah sehingga baik bawahan (rakyat) maupun atasan (pemerintah) memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan pemikiran.
- c. Mendorong kemampuan berpikir kreatif dari berbagai arah demi kepentingan bersama dan tercapainya tujuan.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Secara prinsip, tidak ada perbedaan antar satu orang dengan lainnya yang mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang. Akan tetapi seiring adanya banyak perbedaan yang ada dalam diri tiap manusia, perbedaan dalam kelompok, perbedaan tingkat pendidikan dan banyak perbedaan lainnya, maka ada beberapa hal yang memengaruhi tingkat partisipasi seseorang.

Faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi antara lain pendidikan, penghasilan dan pekerjaan anggota masyarakat. Tingkat pendidikan orang tua siswa memiliki hubungan yang positif terhadap partisipasinya dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. Menurut Soemanto R B, mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih tinggi derajat partisipasinya dalam pembangunan, hal mana karena dibawa oleh semakin kesadarannya terhadap pembangunan.

Hal ini berarti semakin tinggi derajat partisipasi terhadap program pemerintah termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan.

Faktor pendidikan juga berpengaruh pada perilaku seseorang dalam menerima dan menolak suatu perubahan yang dirasakan baru. Masyarakat yang berpendidikan ada kecenderungan lebih mudah menerima inovasi jika ditinjau dari segi kemudahan (*accessibility*) atau dalam mendapatkan informasi yang mempengaruhi sikapnya. Seseorang yang mempunyai derajat pendidikan mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam menjangkau sumber informasi. Oleh karena itu, orang yang mempunyai pendidikan kuat akan tertanam rasa ingin tahu sehingga akan selalu berusaha untuk tahu tentang inovasi baru dari pengalaman-pengalaman belajar selama hidup.

Faktor penghasilan merupakan indikator status ekonomi seseorang, faktor ini mempunyai kecenderungan bahwa seseorang dengan status ekonomi tinggi pada umumnya status sosialnya tinggi pula. Dengan kondisi semacam ini mempunyai peranan besar yang dimainkan dalam masyarakat dan ada kecenderungan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan terutama gejala ini dominan di masyarakat pedesaan.

Pengaruh ekonomi jika diukur dalam besarnya kontribusi dalam kegiatan pembangunan ada kecenderungan lebih besar kontribusi berupa tenaga. Dalam hubungannya partisipasi orang tua siswa dalam membantu pengembangan proses pembelajaran pada tahapan pelaksanaan, faktor penghasilan mempunyai peranan, karena untuk melaksanakan inovasi membutuhkan banyak modal yang sifatnya lebih intensif.

Faktor lain disampaikan oleh Angell, menyatakan, partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, lamanya tinggal.

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

e. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam

lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

5. Dinamika Partisipasi Politik

Sebagaimana disebutkan di atas, partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Jelasnya, partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam membuat keputusan, melaksanakan keputusan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk yang berkaitan dengan keterlibatan aktif maupun keterlibatan pasif setiap individu dalam hierarki sistem politik.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Secara umum masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Modernisasi telah menghasilkan partisipasi politik yang meluas. Partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.⁵

Konsep partisipasi politik (*polytical participation*) secara singkat biasanya dipahami sebagai keikutsertaan warga negara dalam proses-proses politik secara sukarela. Kata warga negara di sini merujuk pada individu atau mungkin kelompok-kelompok dalam masyarakat yang bukan orang-orang yang duduk dalam lembaga-lembaga resmi seperti parlemen, jaksa, atau hakim.

⁵ Sudijono Sastroatmodjo, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang, IKIP Semarang Press, hlm., 67

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran tersebut sering dijumpai terutama dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. Huntington dan Nelson membedakan partisipasi yaitu bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (*mobilized participation*).⁶

Ada pula pendapat bahwa partisipasi politik hanya mencakup kegiatan yang bersifat positif. Akan tetapi, Huntington dan Nelson menganggap bahwa kegiatan yang ada unsur destruktifnya seperti demonstrasi, terror, pembunuhan politik, dan lain-lain, merupakan suatu bentuk partisipasi. Pendapat Huntington dan Nelson dibatasi oleh beberapa hal: pertama, menurut mereka partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap. Dalam hal ini, mereka tidak memasukkan komponen-komponen subjektif seperti pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai politik, serta keefektifan politik, tetapi lebih ditekankan pada bagaimana sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk tindakan politik.

⁶ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, ed.revisi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 370

Kedua, yang dimaksudkan dalam partisipasi politik itu adalah warga negara biasa, bukan pejabat-pejabat pemerintah. Ketiga, kegiatan partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, terlepas apakah itu legal atau tidak, seperti demonstrasi, kekerasan, bahkan pemberontakan. Keempat, partisipasi politik juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, baik efektif atau tidak, berhasil atau gagal. Kelima, partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Langsung artinya tanpa perantara, sedangkan tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan kepada pemerintah.

Para ahli memetakan bentuk partisipasi politik masyarakat menjadi beberapa bentuk. Menurut Milbrath dan Goel, memperlihatkan bahwa masyarakat dibagi dalam tiga kategori: a. pemain (*gladiators*), b. penonton (*spectators*), c. apatis (*apathetic*).⁷ Pemain (*gladiators*) yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik, penonton (*spectators*) termasuk populasi yang aktif secara minimal, termasuk menggunakan hak pilihnya. Sedangkan apatis yaitu orang yang tidak aktif sama sekali, termasuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam buku lain disebutkan yang keempat adalah pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.⁸

Selanjutnya, menurut David F Roth dan Frank L. Wilson, melihat masyarakat terbagi dalam empat kategori: a. aktivis (*activists*), b. partisipan (*participants*), c. penonton (*onlookers*), d. apolitis (*apoliticals*).¹⁷ Aktivis (*Activists*) terdiri atas pejabat publik atau calon pejabat publik, fungsionaris partai politik, pimpinan kelompok kepentingan, *the deviant* (termasuk di dalamnya pembunuh

⁷ *Ibid.*, hlm. 372

⁸ Sudjono Sastroatmodjo, *Op.Cit*, hlm. 75

dengan maksud politik, pembajak, dan teroris). Partisipan terdiri dari orang yang bekerja untuk kampanye, anggota partai secara aktif, partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis, serta orang yang terlibat dalam komunitas proyek. Sedangkan penonton (*onlookers*) adalah orang yang menghadiri reli-reli politik, anggota dalam kelompok kepentingan, *pe-lobby*, pemilih, orang-orang yang terlibat dalam diskusi politik, serta pemerhati dalam pembangunan politik.

Abramson dan Hardwick membedakan partisipasi politik menjadi dua jenis, yaitu konvensional dan tidak konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional dalam pemilihan umum misalnya adalah memberikan suara dalam pemilu, ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kampanye, bergabung dalam kelompok kepentingan tertentu, melakukan lobi-lobi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, serta menjadi kandidat. Bentuk partisipasi politik konvensional lain yang lebih aktif antara lain adalah ikut ambil bagian dalam kegiatan kampanye, bergabung dalam tim sukses, dan menyumbang dana, karena bentuk partisipasi politik ini berperan lebih aktif dalam memperjuangkan keinginan atau tuntutan. Bentuk yang paling aktif adalah ikut berkompetisi dengan menjadi kandidat, karena keikutsertaannya dalam proses politik nyaris sempurna karena kandidat harus mengeluarkan dana untuk pencalonan dan kampanye, harus terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan kampanye untuk mempengaruhi orang lain agar memberikan dukungan, melakukan lobi-lobi untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu, termasuk melobi penyandang dana serta kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi tertentu.

Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada konteks pemilihan. Ada beberapa bentuk partisipasi politik konvensional lain yang sering dijumpai, antara lain: aktif mencari informasi mengenai berbagai persoalan politik, menulis surat pembaca yang berisi penilaian-penilaian atau saran-saran mengenai berbagai persoalan politik untuk

dipublikasikan di surat kabar atau majalah, mendatangi pejabat lokal untuk menyampaikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan, dan menulis petisi untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan.

Sementara itu, partisipasi politik non-konvensional, mencakup berbagai kegiatan yang cenderung melibatkan banyak orang dalam suatu bentuk kelompok massa dan kadang disertai dengan pelanggaran tertib hukum dan kekerasan. Partisipasi politik non-konvensional dapat diterima secara luas apabila tidak disertai aksi perusakan, anarkis dan kekerasan, seperti misalnya aksi protes dengan cara berpawai seraya membawa spanduk dan poster yang berisi tentang berbagai tuntutan, mengkoordinasikan aksi pemogokan di kalangan buruh atau menuntut kenaikan upah, perbaikan kondisi kerja, dan peningkatan jaminan sosial.

Berbagai pengamatan menunjukkan bahwa jika dilihat dari segi partisipasi politik konvensional, setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa seseorang ikut mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik. Ketiga alasan tersebut adalah a) untuk mengkomunikasikan tuntutan atau aspirasi, b) untuk lebih memantapkan upaya pencapaian tujuan dari sistem politik yang ada, c) untuk menunjukkan dukungan terhadap sistem politik beserta para pemimpin atau elite politik yang ada. Ketiga alasan tersebut saling berkaitan sama lain. Seseorang kadang merasa tidak puas dengan kinerja partai atau kandidat tertentu, maka ia kemudian memberikan suara kepada partai atau kandidat lain dalam pemilihan. Hal tersebut berarti bahwa orang yang bersangkutan mengkomunikasikan aspirasi atau keinginan sekaligus juga memantapkan pencapaian tujuan sistem karena sistem politik pada umumnya dikembangkan antara lain untuk terselenggaranya proses-proses politik dengan mekanisme yang adil dan wajar. Pada saat yang sama hal demikian juga menunjukkan dukungan orang bersangkutan terhadap elite politik tertentu dengan memberikan suara kepadanya.

Sebagaimana telah dikemukakan, kegiatan aksi protes atau demonstrasi sampai tingkat tertentu dapat diterima secara luas sebagai bentuk partisipasi politik dalam masyarakat demokratis. Di Indonesia, aksi protes atau demonstrasi seringkali disertai dengan kekerasan dan pengrusakan yang justru tidak sesuai dengan hakekat demokrasi. Orang-orang yang memberikan suara dan berdemonstrasi tampaknya merupakan bentuk nyata partisipasi politik, tetapi seringkali tindakan mereka tidak didasarkan atas motivasi atau niat pribadi pelaku-pelakunya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Banyaknya personal yang berdemonstrasi ataupun membanjiri tempat pemungutan suara tersebut digerakkan oleh majikan mereka, yang apabila tidak menuruti akan mengancam pekerjaan yang berpengaruh pada masa depan mereka. Karena itu mereka tidak sadar bahwa tindakan yang dilakukan itu akan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Kontribusi partisipasi politik tidak dapat disamaratakan dalam semua sistem politik. Sistem politik yang satu lebih menekankan arti pentingnya partisipasi politik dari yang lain dalam sebuah sistem politik yang berbeda, meskipun perbedaannya tidaklah selalu formal. Dalam masyarakat yang primitif yang politiknya cenderung terintegrasi dengan kegiatan masyarakat, umumnya partisipasinya cenderung tinggi bahkan mungkin sulit untuk dibedakan dari kegiatan lain. Di pihak lain, dalam masyarakat yang saling berhubungan karena adanya komunikasi dan institusi, pengaruh modern, dan tradisional, partisipasinya mungkin telah dibatasi oleh faktor-faktor seperti melek huruf, dan masalah-masalah umum komunikasi.

B. Teori Umum Perilaku Memilih

Studi tentang perilaku memilih merupakan studi mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam kontestasi politik. Perilaku memilih baik sebagai konstituen maupun masyarakat umum di sini dipahamisebagai bagian dari

konsep partisipasi politik rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung demokratis.

Berdasarkan pada penelitian para ahli tentang perilaku memilih, sebenarnya perilaku memilih bisa dikategorikan ke dalam dua besaran, yaitu:

1. Perilaku Memilih Rasional. Perilaku memilih ini, notabane disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari internal pemilih. Sehingga pemilih, di sini berkedudukan sebagai makhluk yang independen, memiliki hak bebas untuk menentukan memilih partai atau kandidat manapun. Dan sebagian besar, pendasaran mereka berasal dari internal pemilih sendiri, hasil berpikir dan penilaian terhadap objek politik tertentu seperti visi, misi dan program serta kepribadian kandidat.
2. Perilaku Memilih Emosional. Sementara untuk perilaku memilih ini, lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan seperti faktor sosiologis, struktur sosial, ekologi dan sosio-psikologi, misalnya sama ideologi, komunitas, daerah, dan kerabat.

Selain dua teori perilaku memilih tadi, sekarang berkembang fenomena di masyarakat seiring dengan liberalisasi politik yang dipengaruhi oleh liberalisasi ekonomi yaitu Perilaku Memilih Transaksional, yakni mentransaksikan hak pilih/suaranya dengan barang atau uang. Politik ibarat panggung ekonomi, jual beli. Seiring dengan trend pasar bebas ekonomi, pasar bebas politik juga menjadi trend bangsa Indonesia. Sangat lazim jika sekarang ini biaya politik sangat mahal, seorang menjadi caleg harus siap dengan uang ratusan juta bahkan milyaran rupiah, apalagi ketika hendak menjadi calon presiden tentu uang yang dibutuhkan sampai trilyunan rupiah.

Munculnya trend baru Memilih Transaksional ini kian jamak. Dalam sebuah perilaku memilih, pemilih tidak hanya dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosiologis, melainkan terdapat faktor-faktor situasional yang ikut berperan

dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang. Dengan begitu, para pemilih tidak hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi juga bebas bertindak. Faktor-faktor situasional itu bisa merupakan isu-isu politik ataupun kandidat yang dicalonkan.

Dengan demikian, penjelasan-penjelasan perilaku memilih tidaklah harus permanen seperti karakteristik-karakteristik sosiologis dan identifikasi partai tetapi berubah-ubah sesuai dengan waktu dan peristiwa-peristiwa dramatik yang menyangkut persoalan-persoalan mendasar. Dengan begitu, isu-isu politik menjadi pertimbangan penting. Para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Persoalan ia akan menggunakan rasionalitas, emosionalitas atau transaksionalitas menjadi wilayah pribadi sebagai warga negara. Masalahnya ketika politik ditransaksikan dinilai bahaya bagi masa depan bangsa karena akan menyuburkan korupsi di kalangan pejabat.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat memiliki perbedaan dalam intensitas dan bentuknya. Hal itu di samping berkaitan dengan sistem politik, juga berhubungan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Weimer, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi partisipasi politik agar menjadi lebih luas. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. modernisasi.

Modernisasi yang kini selalu berkembang di segala aspek dan bidang masyarakat, kini berimplikasi pada partisipasi warga, seperti kaum buruh, pedagang dan professional untuk ikut serta mempengaruhi

kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik. Hal ini sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.

2. Perubahan Struktur Sosial

Terjadinya perubahan dalam struktur kelas sosial ini diakibatkan dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi, sehingga membawa perubahan dalam pola partisipasi politik. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa merupakan faktor partisipasi politik masyarakat. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang meluas mempermudah penyebaran ide-ide itu ke seluruh lapisan masyarakat. Hal itu berimplikasi pada tuntutan rakyat dalam ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah.

3. Konflik Pimpinan

Konflik para pemimpin, bukanlah hal asing sekarang ini. Faktor konflik di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan seringkali dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Implikasinya adalah munculnya tuntutan terhadap hak-hak rakyat, sehingga pertentangan dan perjuangan kelas menengah terhadap kaum bangsawan yang memegang kekuasaan mengakibatkan perluasan hak pilih rakyat.⁹

Sementara itu, Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yakni kesadaran politik seseorang dan kepercayaan politik terhadap pemerintah.¹⁰ Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara baik hak-hak politik, ekonomi, maupun hak mendapat jaminan sosial dan hukum. Selain itu, kewajibannya sebagai

⁹ Soedjono Sastroatmodjo, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang, IKIP Press, hlm., 89-90

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 91

warga negara dalam sistem politik maupun kehidupan sosial juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik. Faktor pertama tersebut sebenarnya juga menyangkut seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang akan lingkungan masyarakat dan politik di sekitarnya. Faktor kedua menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan maupun terhadap pelaksanaan pemerintahannya. Penilaian itu merupakan rangkaian dari kepercayaannya, baik yang menyangkut apakah pemerintah itu dapat dipercaya atau tidak, maupun apakah pemerintah dapat dipengaruhi atau tidak. Artinya, jika mereka memandang pemerintah tidak dapat dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan politik, maka bagi mereka berpartisipasi secara aktif adalah hal yang sia-sia.

Dari sejarah politik Indonesia, krisis partisipasi pada prinsipnya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya logika formal yang menyatakan bahwa infrastruktur politik dibentuk tanpa melibatkan keikutsertaan rakyat, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh suprastruktur politik dirasakan kurang ada ikatan batin dengan sebagian rakyat. Kedua, setiap keputusan suprastruktur politik harus mengikat dan dipaksakan (*enforcement*).

Hal itu karena adanya pengkotakan dan aliran sempit (primordial, kesukuan, dsb) yang tidak mendapat respon yang wajar dari rakyat. Ketiga, apatis yang tumbuh dan seringkali disusul dengan manifestasi ekstern berupa separatism dan demokrasi. Keempat adanya volume tuntutan yang tidak mendapatkan wadah yang cukup dalam struktur politik sehingga banyak persoalan pembangunan untuk mengembangkan masyarakat menjadi terganggu.¹¹

Di sisi lain, merujuk pada pendapat Bismar Arianto¹² bahwa alasan rendahnya partisipasi masyarakat untuk memilih diklasifikasikan menjadi 2

¹¹ *Ibid.*, hlm. 95

¹² *Bismar Arianto, 2011, "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu". Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. I, No. 1*

hal yakni faktor Internal dan faktor Eksternal. Untuk lebih jelasnya dalam menjelaskan masalah tersebut berikut diuraikan sebagai berikut.

1. Faktor Internal

Adapun faktor internal itu sendiri meliputi 3 faktor utama yakni:

a. Faktor Teknis

Faktor teknis yang penulis maksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat di klasifikasikan ke dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa ditolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah. Sedang berada di luar kota. Kondisi yang seperti yang penulis maksud teknis mutlak. Teknis yang dapat ditolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan. Pada kasus-kasus seperti ini dalam pemahaman penulis pemilih masih bisa mensiasatinya, yaitu dengan cara mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu baru melakukan aktivitas atau keperluan yang bersifat pribadi.

Pemilih golput karena alasan teknis yang tipe kedua ini cenderung tidak mengetahui esensi dari menggunakan hak pilih, sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada menggunakan hak pilihnya. Pemilih ideal harus mengetahui dampak dari satu suara yang diberikan dalam Pemilu. Hakikatnya suara yang diberikan itulah yang menentukan pemimpin lima tahun mendatang.

Dengan memilih pemimpin yang baik berarti memilih berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik pula.

b. Faktor Pekerjaan

Faktor pekerjaan adalah pekerjaan sehari-hari pemilih. Faktor pekerjaan pemilih ini dalam pemahaman penulis memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Berdasarkan data sensus Penduduk Indonesia tahun 2010 dari 107,41 juta orang yang bekerja, paling banyak bekerja di sektor pertanian yaitu 42,83 juta orang (39,88 persen), disusul sektor perdagangan sebesar 22,21 juta orang (20,68 persen), dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 15,62 juta orang (14,54 persen). Data di atas menunjukkan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor informal, dimana penghasilannya sangat terkait dengan intensitasnya bekerja. Banyak dari sektor informal yang baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani harian. Kemudian ada pekerjaan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti para pebisnis, pelaut atau penggali tambang. Kondisi seperti membuat mereka harus tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS.

Maka dalam pemahaman penulis faktor pekerjaan cukup signifikan yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam sebuah pemilihan umum. Pemilih dalam kondisi seperti ini dihadapkan pada dua pilihan menggunakan hak pilih yang akan mengancam berkurang penghasilannya atau pergi bekerja dan tidak memilih.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Ada tiga yang masuk pada kategori ini menurut pemilih yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik.

a. Faktor Administratif

Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Kasus Pemilu legislatif 2009 adalah buktinya banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak bisa ikut dalam Pemilu karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori golput.

Faktor berikut yang menjadi penghalang dari aspek administrasi adalah permasalahan kartu identitas. Masih ada masyarakat tidak memiliki KTP. Jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak akan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena secara administratif KTP yang menjadi rujukan dalam mendata dan membuat DPT. Maka masyarakat baru bisa terdaftar sebagai pemilih minimal sudah tinggal 6 bulan di satu tempat.

Golput yang diakibatkan oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih.

Selain itu dituntut inisiatif masyarakat untuk mendatangi petugas pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Langkah berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) harus tempel di tempat-tempat strategis agar bisa dibaca oleh masyarakat. Masyarakat juga harus berinisiatif melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segera melapor ke pengurus RT atau petugas pendataan. Langkah berikut untuk meminimalisir terjadi golput karena aspek administrasi

adalah dengan memanfaatkan data kependudukan berbasis IT. Upaya elektronik Kartu Tanda Penduduk (E KTP) yang dilakukan pemerintahan sekarang dalam pandangan penulis sangat efektif dalam meminimalisir golput administratif.

b. Sosialisasi

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan Pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas Pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur Pemilu legislatif dan Pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/ RW.

Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap Pemilu terutama Pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta Pemilu yang berbeda. Pada Pemilu 1999 diikuti sebanyak 48 partai politik, pada Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik dan Pemilu 2009 diikuti oleh 41 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Kondisi ini menuntut perlunya sosialisasi terhadap masyarakat.

Permasalahan berikut yang menuntut perlunya sosialisasi adalah mekanisme pemilihan yang berbeda antara Pemilu sebelum reformasi dengan Pemilu sebelumnya. Dimana pada era orde baru hanya memilih lambang partai sementara sekarang selain memilih lambang juga harus memilih nama salah satu calon di partai tersebut. Perubahan yang signifikan adalah pada Pemilu 2009 dimana kita tidak lagi mencoblos dalam memilih tetapi dengan cara menandai. Kondisi ini semualah yang menuntut pentingnya sosialisasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan meminimalisir angka golput dalam setiap Pemilu. Terlepas dari itu semua penduduk di Indonesia sebagai besar berada di pedesaan maka menyebar luaskan informasi Pemilu dinilai penting, apalagi bagi masyarakat yang

jauh dari akses transportasi dan informasi, maka sosialisasi dari mulut ke mulut menjadi faktor kunci mengurangi angka golput.

c. Faktor Politik

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa Pemilu/Pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan.

Para pelaku politik punya kecenderungan baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti Pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi itu sendiri. Faktor lain adalah para politisi yang tidak mengakar, politisi yang tidak dekat dan tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat dengan para petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan. Mereka lebih mengantungkan diri pada pemimpinnya dibandingkan mendekati diri dengan konstituen atau pemilihnya. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan antipati masyarakat terhadap partai politik itu sendiri. Idealnya konflik yang ditampilkan para politisi seharusnya tetap mengedepankan etika politik untuk menjaga kewibawaan politik dan kepercayaan masyarakat.

Politik pragmatik yang semakin menguat, baik dikalangan politisi maupun di sebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari

keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangkan sebagian masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi semakin menjadi-jadi. Baru mau mendukung, memilih jika ada mendapatkan keuntungan materi, maka muncul ungkapan kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau sudah jadi/terpilih mereka akan lupa janji. Kondisi-kondisi yang seperti penulis uraikan ini yang secara politik memengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian Masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi. Harus diakui tidak semua politisi seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Mengingat fokus masalah dalam penelitian ini perilaku politik masyarakat provinsi Jawa Tengah, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat eksploratif. Metode penelitian yang penulis pilih adalah metode kualitatif,¹ agar mendapatkan data yang holistik (utuh) mengenai kompleksitas perilaku politik masyarakat provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi politik karena masalah yang diteliti adalah partisipasi politik masyarakat provinsi Jawa Tengah. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang menfokuskan pada kajian tentang masyarakat dipandang dari satu segi tertentu. Pusat perhatian sosiologi ialah tingkah-laku manusia, baik yang individual maupun yang kolektif, namun lebih banyak segi kolektifnya. Dengan demikian sosiologi merupakan studi mengenai tingkah-laku manusia dalam konteks sosial.²

Sedangkan politik merupakan disiplin ilmu yang hanya memperhatikan beberapa aspek saja dari masyarakat. Politik merupakan ilmu yang memiliki sifat koordinatif dan merupakan cabang khusus dari sosiologi (atau dari ilmu pengetahuan sosial). Di antara aspek-aspek masyarakat yang menjadi pusat perhatian studi politik adalah lembaga-lembaga sosial seperti badan legislatif dan eksekutif, partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan, dan beberapa bidang khusus dari mental serta tingkah-laku manusia seperti proses pemilihan atau legislatif. Sehingga sosiologi politik merupakan *subject area* atau disiplin yang mempelajari mata-rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur- struktur sosial dan struktur-struktur

¹ Jerome Kirk dan Marc L. Miller, 1986, *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills: Sage Publication, hlm. 9; Lexy J. Moeliono, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Rusda Karya, hlm. 3.

² Michael Rush & Phillip Althoff, 2002, *Pengantar Sosiologi Politik*, Cet. 9, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1

politik, dan antara tingkah-laku sosial dengan tingkah-laku politik.³

Dengan demikian, sosiologi politik merupakan satu jembatan teoritis dan jembatan metodologis antara sosiologi dan ilmu pengetahuan politik. Skema konsepsi sosiologi politik menjadi empat pembahasan yaitu: sosialisasi politik, partisipasi politik, penerimaan/perekrutan politik, dan komunikasi politik. Semua konsep tersebut sifatnya interdependent, bergantung satu sama lain dan saling berpautan. Pendekatan sosiologi politik yang dimaksud pada penelitian ini adalah partisipasi politik dengan memberikan evaluasi atas apa yang sudah terjadi di masyarakat. Menurut Suharsimi Arikunto penelitian evaluasi dapat diartikan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan suatu penelitian.⁴

B. Populasi

Lokasi penelitian ini Provinsi Jawa Tengah, salah satu provinsi di bagian tengah pulau Jawa. Secara geografis, provinsi dengan ibu kota di Semarang ini berbatasan dengan provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa dan terletak antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan adalah 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).⁵

³ *Ibid.*, hlm. 22

⁴ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 223

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2015, *Jawa Tengah dalam Angka 2015*, BPS Prov Jawa Tengah, hlm. 3

Secara administratif, provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Total ada 35 kabupaten dan kota, yaitu kabupaten Cilacap, kabupaten Banyumas, kabupaten Purbalingga, kabupaten Banjarnegara, kabupaten Kebumen kabupaten Purworejo, kabupaten Wonosobo, kabupaten Magelang, kabupaten Boyolali, kabupaten Klaten, kabupaten Sukoharjo, kabupaten Wonogiri, kabupaten Karanganyar, kabupaten Sragen, kabupaten Grobogan, kabupaten Blora, kabupaten Rembang, kabupaten Pati, kabupaten Kudus, kabupaten Jepara, kabupaten Demak, kabupaten Semarang, kabupaten Temanggung, kabupaten Kendal, kabupaten Batang, kabupaten Pekalongan, kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal, kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Subjek penelitiannya adalah perilaku politik warga masyarakat provinsi Jawa Tengah.

C. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.⁶ Data primer dalam penelitian ini adalah perilaku politik masyarakat Jawa Tengah yang tertuang dalam angka-angka partisipasi yang dirilis oleh KPU provinsi Jawa Tengah maupun KPU kabupaten dan kota.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain (literatur lain), tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek

⁶ Marzuki, 2005, *Metodologi Riset; Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Yogyakarta: EKONISA, hlm. 60

penelitiannya.⁷ Adapaun data skunder dalam penelitian ini adalah meliputi data-data lain yang diambil dari literatur dan data-data mengenai provinsi Jawa Tengah, seperti data-data perekonomian Jawa Tengah, kondisi masyarakat Jawa Tengah dan sebagainya.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dilakukan dengan:

a. Pengamatan terlibat (*participant observation*).

Pengamatan ini menuntut peneliti aktif berinteraksi dengan subyek dalam memburu data,⁸ dalam posisi sebagai pemeran serta (*complete participant*). Akan tetapi, dalam posisi tertentu, atas ijin subyek, hal-hal yang bersifat rahasia pun boleh diamati.⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan berbagai data yang terkait dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain adalah tingkat partisipasi politik masyarakat Jawa Tengah, data PDRB Jawa Tengah, kondisi perekonomian Jawa Tengah, kondisi pelaksanaan pemilu Jawa Tengah dan lain-lain.¹⁰

c. Wawancara

Paling tidak peneliti akan menggunakan metode wawancara berstruktur (*structured interview*), yaitu pertanyaan telah dirumuskan sebelum berhadapan dengan informan¹¹. Dengan pertanyaan dan jawaban yang telah dirumuskan, pengolahan data lebih mudah

⁷ *Ibid.*, hlm. 60

⁸ Kartini Kartono, 1990, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 162

⁹ Michael Quinn Patton, 1987, *Qualitative Evaluation Methods*, New York: Beverly Hills, hlm. 132. Jack R. Fraenkel & Norman E Wallen, 1993, *How to Design and Evaluative Research in Educations*, New York: Megrow Hill Inc, hlm. 384.

¹⁰ Anselem Strauss & Juliet Carbin, 1990, *Basic Of Qualitative Research*, California: Sage Production, hlm. 17.

¹¹ S. Nasution, 2003, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 117

dilakukan. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan teknik tidak berstruktur (*unstructured interview*). Langkah ini sangat berharga dalam memahami karakter asli sebuah komunitas sosial karena akan memperoleh jawaban yang standar dan lebih terbuka. Hanya saja, mungkin terjadi kemubaziran data akibat ketidak fokusan tanya jawab.

D. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan ke dalam pola, tema, kategori dan interpretasi. Analisis ini bertujuan memberikan makna terhadap data, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antara berbagai konsep. Prosedur kegiatan ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang sangat lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah, yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi dapat membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek yang dibutuhkan.

2. Display Data

Analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul demikian banyak. Data yang bertumpuk menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan detail secara keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian detailnya dipetakan dengan jelas.

3. Komparasi Data

Untuk mencari relevansi berbagai data, terkadang juga dilakukan perbandingan antar data-data yang ada untuk diambil suatu kesimpulan. Komparasi ini dilakukan untuk menemukan fakta-fakta dan data-data baru yang masih tersembunyi dan belum terjelaskan secara nyata.

4. Verifikasi Data

Data yang sudah dipolakan, difokuskan, dan disusun secara sistematis baik melalui penentuan tema maupun model grafik atau juga matrik. Kemudian disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Namun kesimpulan itu baru bersifat sementara saja dan bersifat umum. Supaya kesimpulan diperoleh secara lebih dalam (*grounded*), maka data lain yang baru dicari. Data baru ini bertugas melakukan pengujian terhadap berbagai kesimpulan tentatif tadi.¹² Untuk menguji kredibilitas data, digunakan empat cara:

a. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Kredibilitas ini merupakan konsep pengganti validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Kriteria kredibilitas ini berfungsi untuk melakukan penelaahan data secara akurat agar tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai.

Adapun teknik untuk menentukan kredibilitas penelitian ini adalah dengan memperpanjang masa observasi, pengamatan yang terus menerus, menganalisis kasus negatif dan triangulasi (*5 triangulation method*), yakni:

- 1) *Data triangulation*. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan data dari informan yang berbeda-beda. Jika informan yang berbeda-beda menjelaskan suatu hal dengan serupa, maka tingkat validitas kesimpulan dari data ini dianggap tinggi.
- 2) *Investigator triangulation*. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti yang berbeda. Dikatakan tingkat validitasnya tinggi jika lebih dari satu peneliti memperoleh informasi yang sama tentang objek yang diteliti.

¹² Matthew B. Miles; A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohandi, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 86-105

- 3) *Theory triangulation*. Pengukuran dilakukan dengan menganalisis satu set data/informasi dengan perspektif teoritis yang berbeda-beda, biasanya disiplin ilmunya juga berbeda. Jika kesimpulan dari hasil analisa berbagai perspektif sama, maka validitas dari hasil penelitian itu dianggap sudah baik.
- 4) *Methodological triangulation*. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian dengan metode yang berbeda, misalnya antara hasil penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Semakin sama hasil penelitian dengan metode yang berbeda, maka semakin valid hasil dari penelitian tersebut.
- 5) *Environmental triangulation*. Pengukuran dengan cara ini dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian pada konteks-konteks yang berbeda. Pengertian konteks di sini bisa mengacu kepada waktu, tempat atau kompleksitas subjek yang diteliti.¹³

b. Keteralihan (*transferability*)

Konsep ini merupakan pengganti dari validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal diperlukan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh generalisasi. Dalam kualitatif, generalisasi tidak dipastikan. Ini bergantung pada pemakai, apakah akan diaplikasikan lagi atau tidak. Yang jelas, tidak akan terjadi situasi yang sama. Transferabilitas hanya melihat "kemiripan" sebagai kemungkinan terhadap situasi-situasi yang berbeda. Teknik yang digunakan untuk transferabilitas ini dilakukan dengan uraian rinci (*thick description*).

c. Kebergantungan (*dependability*)

Konsep ini merupakan pengganti dari konsep *reliability* dalam penelitian kuantitatif. *Reliability* tercapai bila alat ukur yang

¹³ Dedi Supriadi Adhuri, *Penelitian Kualitatif: Teknik Penelitian, Masalah Reliabilitas-Validitas dan Analisis Data*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI), Paper Pelatihan Penelitian Kualitatif, Solo, 13 Oktober 2007.

digunakan secara berulang-ulang, dan hasilnya sama. Dalam penelitian kualitatif, alat ukur bukan benda, melainkan manusia atau si peneliti itu sendiri. Teknik yang digunakan untuk mengukur kebergantungan adalah *auditing*, yaitu pemeriksaan data yang sudah dipolakan.

d. Kepastian (*confirmability*)

Konsep ini merupakan pengganti dari konsep "objektivitas" dalam penelitian kuantitatif. Bila pada kualitatif, objektivitas itu diukur melalui orang atau peneliti. Diakui bahwa peneliti itu memiliki pengalaman subjektif. Namun, bila pengalaman peneliti tersebut dapat disepakati oleh beberapa orang, maka pengalaman peneliti itu bisa dipandang objektif. Jadi persoalan objektivitas dan subjektivitas dalam penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh seseorang.

5. Kesimpulan

Setelah melakukan kegiatan analisis, selanjutnya akan dilakukan penyimpulan dengan mengkonstruksi mata rantai logik antara berbagai evidensi, sehingga ditemukan mata rantai logik yang menghubungkan berbagai fenomena secara obyektif. Dari sinilah kesimpulan akan diambil.¹⁴

¹⁴ Noeng Muhajir, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakerarasin, hlm.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Jawa. Provinsi dengan ibu kota di Semarang ini berbatasan dengan provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa dan terletak antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan adalah 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).¹

Secara administratif, provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Dari sisi tingkat kemiringan lahan, sebanyak 38 persen lahan memiliki kemiringan 0 – 2 persen, 31 persen lahan memiliki kemiringan 2 – 15 persen, 19 persen lahan memiliki kemiringan 15 – 40 persen, dan sisanya 12 persen lahan memiliki kemiringan lebih dari 40 persen.

Kawasan pantai utara Jawa Tengah memiliki dataran rendah yang sempit. Di kawasan Brebes selebar 40 km dari pantai, dan di Semarang hanya selebar 4 km. Dataran ini bersambung dengan depresi Semarang-Rembang di timur. Di selatan kawasan tersebut terdapat pegunungan kapur utara dan pegunungan kendeng, yakni pegunungan kapur yang membentang dari sebelah timur Semarang hingga Lamongan (Jawa Timur). Rangkaian utama pegunungan di Jawa Tengah adalah

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2015, *Jawa Tengah dalam Angka 2015*, BPS Prov Jawa Tengah, hlm. 3

pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Rangkaian pegunungan Serayu Utara membentuk rantai pegunungan yang menghubungkan rangkaian Bogor di Jawa Barat dengan pegunungan Kendeng di timur. Lebar rangkaian pegunungan ini sekitar 30 – 50 km; di ujung baratnya terdapat Gunung Slamet dan bagian timur merupakan Dataran Tinggi Dieng dengan puncak-puncaknya gunung Prahu dan gunung Ungaran. Antara rangkaian Pegunungan Serayu Utara dan Pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh Depresi Serayu yang membentang dari Majenang (Kabupaten Cilacap), Purwokerto, hingga Wonosobo. Sebelah timur depresi ini terdapat gunung berapi Sindoro dan Sumbing, dan sebelah timurnya lagi (kawasan Temanggung dan Magelang) merupakan lanjutan depresi yang membatasi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu.

Pegunungan Serayu Selatan merupakan bagian dari cekungan Jawa Tengah yang terletak di bagian selatan provinsi Jawa Tengah. Mandala ini merupakan geantiklin yang membentang dari barat ke timur sepanjang 100 kilometer dan terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh lembah Jatilawang yaitu bagian barat dan timur. Bagian barat dibentuk oleh Gunung Kabanaran (360 m) dan bisa dideskripsikan mempunyai elevasi yang sama dengan Zona Depresi Bandung di Jawa Barat ataupun sebagai elemen struktural baru di Jawa Tengah. Bagian ini dipisahkan dari zona Bogor oleh Depresi Majenang.

Bagian timur dibangun oleh antiklin Ajibarang (*narrow anticline*) yang dipotong oleh aliran sungai Serayu. Pada timur Banyumas, antiklin tersebut berkembang menjadi antiklinorium dengan lebar mencapai 30 km pada daerah Lukulo (selatan Banjarnegara-Midangan 1043 m) atau sering disebut tinggian Kebumen (*Kebumen High*). Pada bagian paling ujung timur Mandala pegunungan Serayu Selatan dibentuk oleh kubah Pegunungan Kulonprogo (1022 m), yang terletak di antara Purworejo dan sungai progo.

Kawasan pantai selatan Jawa Tengah juga memiliki dataran rendah yang sempit, dengan lebar 10–25 km. Selain itu terdapat Kawasan Karst

Gombang Selatan. Perbukitan yang landai membentang sejajar dengan pantai, dari Yogyakarta hingga Cilacap. Sebelah timur Yogyakarta merupakan daerah pegunungan kapur yang membentang hingga pantai selatan Jawa Timur.

Dari sisi iklim, menurut Stasiun Klimatologi Klas I Semarang, suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2014 berkisar antara 23°C sampai dengan 28°C. Tempat - tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 80 persen sampai dengan 88 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di stasiun Meteorologi Sempor, Kebumen yaitu sebesar 1.320 mm dan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun MPK, Borobudur, Magelang 64 hari.²

2. Kependudukan Jawa Tengah

Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2014 tercatat sebesar 33,52 juta jiwa sekitar 13,29 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan) sebesar 98,41 persen.

Penduduk Jawa Tengah belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. Umumnya penduduk banyak menumpuk di daerah kota dibandingkan kabupaten. Secara rata-rata kepadatan penduduk Jawa Tengah tahun 2014 tercatat sebesar 1.030 jiwa setiap kilometer persegi, dan wilayah terpadat adalah Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan lebih dari 11 ribu orang setiap kilometer persegi.

Jumlah rumah tangga sebesar 9,0 juta pada tahun 2014 sedangkan rata-rata penduduk per rumah tangga di Jawa Tengah tercatat sebesar 3,7

² *Ibid.*, hlm. 5

jiwa. Sedangkan dari sisi pertumbuhan penduduk provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,5% per tahun), sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09% per tahun).

Dari jumlah penduduk di Jawa Tengah tersebut, tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumberdaya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, dan dibedakan sebagai Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja.

Berdasarkan hasil Sakernas, angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 2014 mencapai 17,55 juta orang atau naik sebesar 3,30 persen dibanding tahun sebelumnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 70,72 persen. Sedangkan angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah sebesar 6,02 persen.

Bila dibedakan menurut status pekerjaan utamanya, buruh / karyawan sebesar 31,83 persen. Status pekerjaan ini lebih besar dibanding status pekerjaan lain. Sedangkan berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha sendiri dibantu buruh tetap dan pekerja lainnya masing-masing tercatat sebesar 16,06 persen, 19,91 persen, 3,27 persen dan 28,93 persen.

Sektor pertanian menyerap sekitar 30,86 persen pekerja dan merupakan sektor terbanyak menyerap pekerja. Hal ini dikarenakan sektor tersebut tidak memerlukan pendidikan khusus. Sektor berikutnya yaitu sektor perdagangan dan sektor industri, masing-masing menyerap tenaga kerja sebesar 22,46 persen dan 19,07 persen.

Dari sisi suku penduduk, mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah suku Jawa. Jawa Tengah dikenal sebagai *pusat budaya Jawa*, di mana di kota Surakarta dan Yogyakarta terdapat pusat istana kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga kini. Suku minoritas yang cukup signifikan adalah

Tionghoa, terutama di kawasan perkotaan meskipun di daerah pedesaan juga ditemukan. Pada umumnya mereka bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Komunitas Tionghoa sudah berbaur dengan suku Jawa, dan banyak di antara mereka yang menggunakan Bahasa Jawa dengan logat yang kental sehari-harinya. Pengaruh kental bisa kita rasakan saat berada di kota Semarang serta kota Lasem yang berada di ujung timur laut Jawa Tengah, bahkan Lasem dijuluki *Le Petit Chinois* atau Kota Tionghok Kecil.

Selain itu di beberapa kota-kota besar di Jawa Tengah ditemukan pula komunitas Arab-Indonesia. Mirip dengan komunitas Tionghoa, mereka biasanya bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Di daerah perbatasan dengan Jawa Barat terdapat pula orang Sunda yang sarat akan budaya Sunda, terutama di wilayah Cilacap, Brebes, dan Banyumas.

Adapun dari sisi bahasa yang digunakan, meskipun Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, umumnya sebagian besar menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Jawa Dialek Solo-Jogja atau Mataram dianggap sebagai Bahasa Jawa Standar. Di samping itu terdapat sejumlah dialek Bahasa Jawa; namun secara umum terdiri dari dua, yakni *kulon* dan *timuran*. *Kulon* dituturkan di bagian barat Jawa Tengah, terdiri atas Dialek Banyumasan dan Dialek Tegal; dialek ini memiliki pengucapan yang cukup berbeda dengan Bahasa Jawa Standar. Sedang *Timuran* dituturkan di bagian timur Jawa Tengah, di antaranya terdiri atas Dialek Mataram (Solo-Jogja), Dialek Semarang, dan Dialek Pati. Di antara perbatasan kedua dialek tersebut, dituturkan Bahasa Jawa dengan campuran kedua dialek; daerah tersebut di antaranya adalah Pekalongan dan Kedu.

Di wilayah-wilayah berpopulasi Sunda, yaitu di kabupaten Brebes bagian selatan, dan kabupaten Cilacap utara sekitar kecamatan Dayeuhluhur, orang Sunda masih menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-harinya.

Berbagai macam dialek Bahasa Jawa yang terdapat di Jawa Tengah diantaranya, dialek Pekalongan (Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang), dialek Kedu (Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang), dialek Bagelen (Kabupaten Purworejo), dialek Semarangan (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak), dialek Muria/Pantura Timur (Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati), dialek Blora (Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora), dialek Surakarta (Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar), dialek Banyumasan (Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap), dan dialek Tegal (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang).

Selain itu, berbagai macam dialek Bahasa Sunda yang terdapat di Jawa Tengah, diantaranya, Bahasa Sunda dialek Timur-Laut, yang digunakan di wilayah Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon di provinsi Jawa Barat juga digunakan pada wilayah Kabupaten Brebes bagian Barat dan Selatan yang merupakan wilayah provinsi Jawa Tengah, Bahasa Sunda dialek Tenggara, yang digunakan di wilayah Kabupaten Ciamis sekitar Kota Ciamis dan Kota Banjar di provinsi Jawa Barat juga digunakan pada wilayah Kabupaten Cilacap bagian Utara yang merupakan wilayah provinsi Jawa Tengah.

Bila dilihat dari kacamata agama, sebagian besar penduduk Jawa Tengah beragama Islam yang umumnya dikategorikan ke dalam dua golongan, yaitu kaum Santri dan Abangan. Kaum santri mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat Islam, sedangkan kaum abangan walaupun menganut Islam namun dalam praktiknya masih terpengaruh Kejawen yang kuat. Jumlah pemeluk Islam di Jawa Tengah sekitar 96 persen.

Agama lain yang dianut adalah Kristen (Protestan dan Katolik), Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, dan aliran kepercayaan. Populasi agama Kristen di Jawa Tengah sekitar 1,7 persen, Katholik sekitar 0,9 persen, , Budha 0,16 persen, Hindu 0,05 persen, Konghuchu 0,01 persen dan kepercayaan lain 0,02 persen.

3. Perekonomian Jawa Tengah

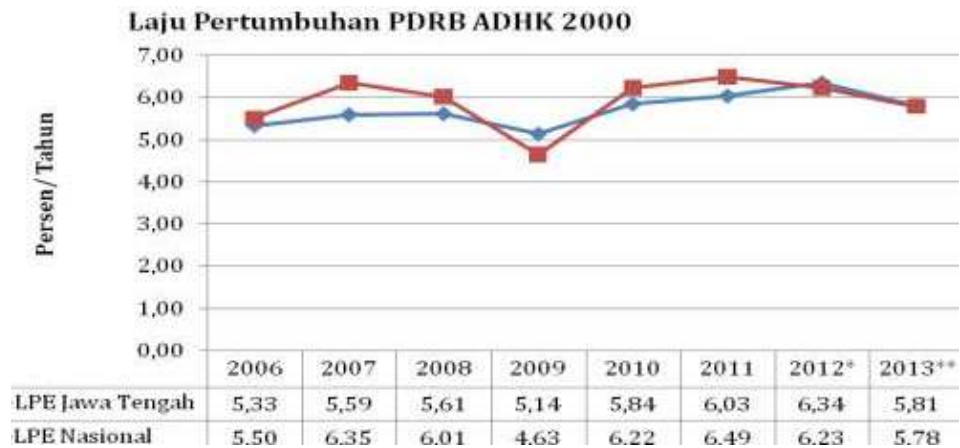
Dilihat dari sisi Sumberdaya alam (SDA) yang dimiliki, Jawa Tengah merupakan salah satu penyangga pangan nasional. Sayangnya, pada tahun 2013, produktivitas padi sekitar 56,06 kuintal per hektar, menurun 2,84 persen dibanding produktivitas tahun sebelumnya. Luas panen padi dan jumlah produksi padi mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,05 persen dan 1,09 persen. Sebagian besar produksi padi merupakan padi sawah, yaitu sekitar 96,74 persen.

Masih pada tahun 2013 hampir semua mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan luas panen jagung 3,85 persen, ubi kayu 8,52 persen, kacang tanah 12,51 persen, kedelai 32,78 persen dan kacang hijau 39,07 persen. Sedangkan untuk padi dan ubi jalar masing-masing mengalami peningkatan sebesar 4,05 dan, 25,14 persen.

Dasi sisi perikanan, produksi yang dihasilkan dari kegiatan ini pada tahun 2013 di Jawa Tengah mencapai 619 ribu ton dengan nilai 6,96 trilyun rupiah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi ikan meningkat 16,19 persen dan nilai produksinya meningkat 42,56 persen. Produksi perikanan didominasi oleh perikanan darat sebesar 375 ribu ton (sekitar 64 persen dari total produksi perikanan) dengan nilai sebesar 5,13 trilyun rupiah.

Dengan keadaan seperti itu, maka potret pembangunan di Jawa Tengah dilihat dari sisi nasional belum menggembirakan. Data bappenas menyebutkan bahwa selama periode 2006-2013 kinerja perekonomian di Provinsi Jawa Tengah cukup baik, terlihat dari pertumbuhan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000 yang tumbuh dengan laju rata-rata 5,71 persen per tahun.



Sumber: BPS, 2014

Dalam pembentukan output nasional, PDRB Provinsi Jawa Tengah berkontribusi sebesar 8,27 persen pada tahun 2012. Dari perspektif wilayah, kontribusi Provinsi Jawa Tengah terhadap output wilayah Jawa Bali sebesar 14,35 persen. Dari sisi besarnya, perekonomian Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga terendah di wilayah Jawa setelah DI Yogyakarta dan Banten.

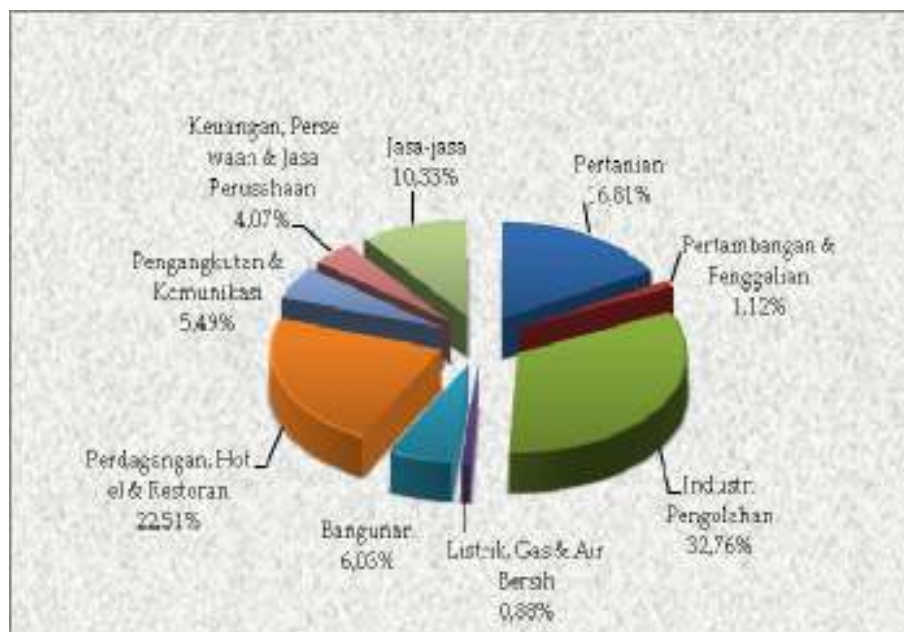
Gambar 1 diatas juga menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2013 lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu 5,81 persen (2012 = 6,34 persen). Rendahnya peningkatan investasi menjadi salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 dibanding tahun 2012. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2013 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 10,56 persen, namun perannya terhadap PDRB hanya sekitar 3,73 persen. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang paling rendah pada tahun 2013, yaitu sebesar 2,18 persen.

Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi investasi PMA dan PMDN Jawa Tengah yaitu sebesar

32,56 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,91 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang juga merupakan sektor dominan memberikan sumbangan bagi perekonomian Jawa Tengah sebesar 20,73 persen dengan pertumbuhan riil sebesar 7,47 persen.

Sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 2,18 persen, masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, karena mampu memberi andil sebesar 18,30 persen. Dari angka-angka indeks implisit PDRB, dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral. Secara agregat indeks implisit di Jawa Tengah tahun 2013 sebesar 279,58. Sedangkan secara sektoral, pertumbuhan indeks implisit yang paling cepat atau di atas angka rata-rata indeks implisit Jawa Tengah pada tahun 2013 terjadi pada sektor listrik dan air bersih sebesar 334,48 persen. Sektor lain yang perkembangan indeks implisitnya paling lamban adalah sektor pertambangan dan penggalan yaitu sebesar 238,75 persen.

Distribusi Persentase PDRB Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013



Dengan karir ini, laju pertumbuhan Jawa tengah belum cukup untuk mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita Provinsi Jawa Tengah dari angka rata-rata nasional. Rasio PDRB per kapita antara Provinsi Jawa Tengah dan nasional menurun dari 56,4 persen menjadi 49,3 persen selama periode 2004-2009. Dengan kenyataan bahwa laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah selama 2000-2010 relatif rendah, yaitu sebesar 0,37 persen per tahun. (lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,49 persen per tahun pada periode yang sama), maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja rata-rata provinsi lain berkembang lebih pesat dari Jawa Tengah.

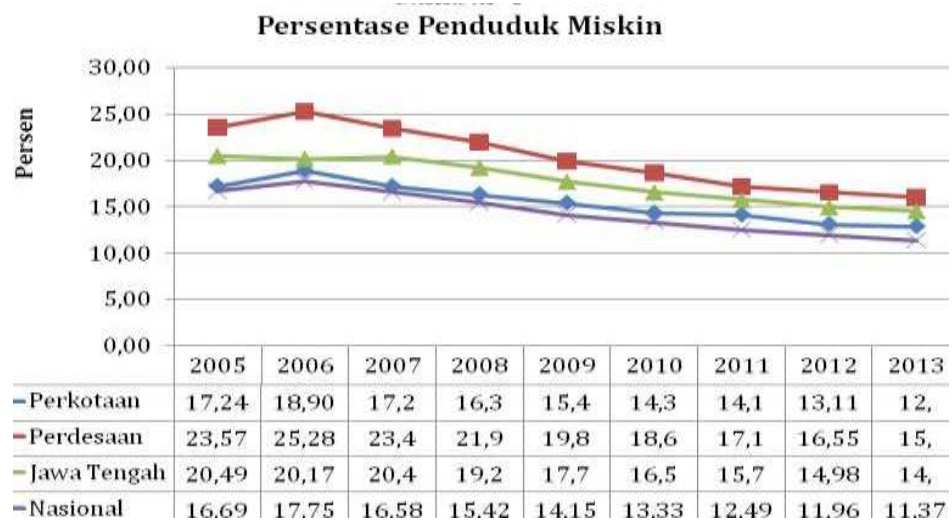


Sumber: BPS, 2014

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Tengah selama 2006-2013 berkurang sebesar 4,85. Perbandingan secara nasional menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Jawa Tengah tergolong rendah. Dengan PDRB per kapita yang relatif rendah dibandingkan nasional, kondisi ini menyiratkan perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pengangguran di tengah pendapatan per-kapita yang rendah ini mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah.

Menurunnya angka pengangguran tersebut juga berdampak positif bagi penurunan kemiskinan wilayah. Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah cenderung menurun selama periode 2006-2013, khususnya di perkotaan. Namun demikian secara nasional tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih tergolong cukup tinggi. Jika pada tahun 2013 persentase penduduk miskin nasional sudah mencapai 11,37 persen, maka tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih mencapai 14,56 persen.

Di tingkat wilayah Jawa kondisi kemiskinan di Jawa Tengah ini merupakan yang tertinggi kedua setelah DI Yogyakarta. Tantangan yang harus dihadapi adalah tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan. Hal ini menegaskan adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di perdesaan.



Yang perlu dicermati adalah karir kabupaten kota dalam melaksanakan pembangunan yang pro-growth, pro-poor and pro human development sehingga berdampak pada IPM.

Pertama, Kabupaten Karanganyar, Sragen, Tegal, purworejo, Kendal, Purbalingga, Brebes, Pemalang terletak pada Kuadran I dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (pro-growth, pro-human development). Dengan

kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

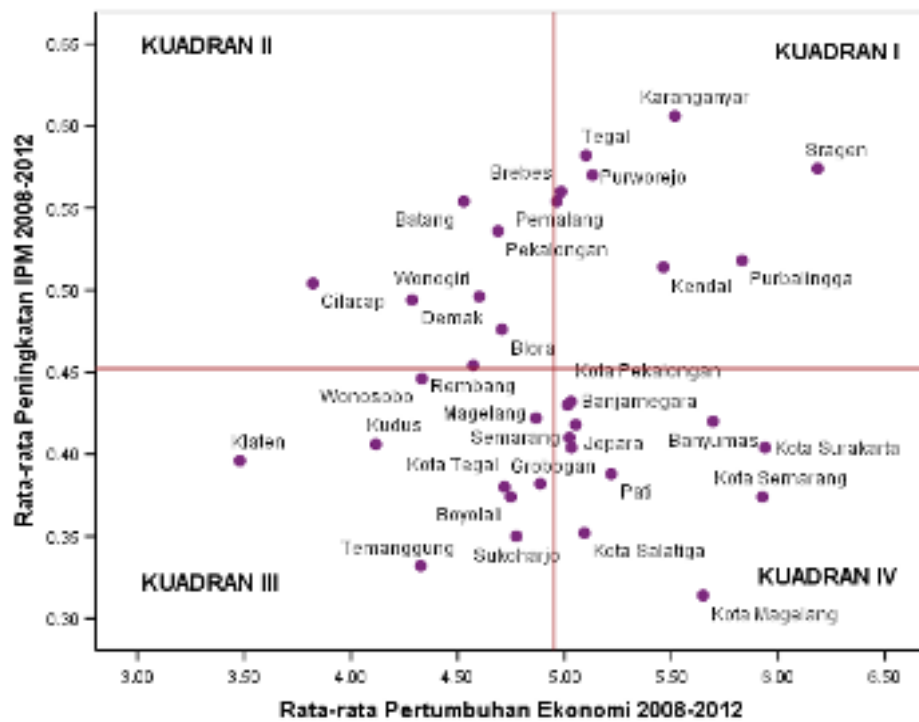
Kedua, Kabupaten Pekalongan, Batang, Wonogiri, Cilacap, Demak, Blora, Rembang yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi seperti Industri manufaktur, pertanian, perdagangan, dan jasa.

Ketiga, Wonosobo, Klaten, Kudus, Magelang, Grobogan, Boyolali, Sukoharjo, Temanggung, dan Kota Tegal terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Keempat, Kabupaten Banjarnegara, Semarang, Jepara, Pati, Banyumas, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, kota Magelang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan

ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Berikut ini adalah gambar kuadran sesuai penjelasan diatas:



4. Partai Politik di Jawa Tengah

Di level nasional, demokrasi yang berkembang di negara kita masih lebih menampakkan wajahnya yang bersifat formal daripada yang bersifat substantif. Hal itu dapat dilacak dari belum maksimalnya partisipasi aktif mayoritas warga negara dalam pemerintahan dan belum tersedianya saluran efektif dalam memwadahi partisipasi mereka. Partisipasi murni warga dan saluran efektif merupakan karakteristik utama demokrasi substantif. Melalui itu, mereka yang tidak berdaya bisa memiliki suara nyata dalam penentuan arah bangsa.

Konsolidasi demokrasi di Jawa Tengah masih bertumpu pada optimalisasi peran partai politik sebagai elemen utama lanskap politik lokal. Sepak terjang dan orientasi parpol nasionalis sangat menentukan corak politik dan demokrasi yang berkembang.

Secara historis, wilayah Jateng merupakan arena pertarungan partai nasionalis, komunis, dan Islam. Konstelasi tersebut tergambar jelas pada Pemilu 1955. Partai Nasional Indonesia (PNI) menang dengan perolehan suara 33,5 persen, disusul Partai Komunis Indonesia (PKI) sebesar 25,8 persen, NU (19,7 persen), dan Masjumi (10,0 persen). PNI menguasai wilayah eks-Karesidenan Tegal, sebagian besar Banyumas, dan Kedu sebagai basis massa. PKI menguasai wilayah eks Karesidenan Surakarta dan sebagian wilayah eks Karesidenan Pati. NU tersebar di Demak, Kudus, Jepara, dan Kabupaten Magelang.

Konstelasi politik seperti ini berubah drastis saat Pemilu 1971. Di bawah rekayasa rezim Orde Baru, kekuatan PNI dipangkas habis sehingga hanya meninggalkan sisa-sisa pendukung tradisionalnya seperti di Purbalingga, Banjarnegara, Sragen, dan Karanganyar. PKI yang sudah dibubarkan pada 1966 massanya banyak yang berpindah ke Golkar. Alhasil, Golkar mampu menguasai sebagian besar wilayah yang telah menjadi basis PNI dan PKI pada Pemilu 1955.

Ketika reformasi digulirkan, terhitung Pemilu 1999 sampai 2014, PDI-P berhasil membalikkan kekuatan Golkar yang dua tahun sebelumnya menguningkan Jateng. Dari 35 kabupaten/kota, PDI-P menguasai 33 daerah, kecuali Jepara (PPP) dan Kabupaten Magelang (PKB). Meski pada Pemilu 2009 PDI-P tetap dominan, secara umum konstelasi politik Jateng berubah cukup drastis dibanding dua pemilu sebelumnya yang ditandai munculnya Partai Demokrat sebagai kekuatan baru.

Hasil Pileg 2014, dari 77 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pusat, PDI-P mendapatkan suara terbanyak dengan mengantarkan 18 orang duduk di kursi gedung Senayan DPR RI. Menyusul di tempat kedua partai Golkar dengan perolehan 11 kursi. Di urutan ketiga dan keempat masing-masing diperoleh oleh PKB dan Gerindra dengan 10 kursi. Di tempat berikutnya, PAN menyusul dengan perolehan 8 kursi, PPP 7 kursi, Nasdem 5 kursi. Pada urutan terakhir Partai Demokrat dan

PKS masing-masing memperoleh 4 kursi. Tiga partai tersisa, yakni Partai Hanura, PBB dan PKPI tidak memperoleh kursi di DPR RI dari wilayah Jawa Tengah ini.

Di tingkat provinsi Jawa Tengah, pada pemilu terakhir ini, PDI-P juga menguasai perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng). Dari total 100 kursi, partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ini memperoleh 27 kursi atau bertambah 4 dibanding pemilu 2009. Selanjutnya secara berurutan, perolehan kursi lain diperoleh PKB sebanyak 13 kursi, Gerindra 11 kursi, PKS dan Golkar masing-masing 10 kursi, Demokrat 9 kursi, PAN dan PPP masing-masing 8 kursi dan Nasdem memperoleh 4 kursi.

Dilihat dari sisi gender, komposisinya adalah 23 wanita dan 67 laki-laki. Jumlah wanita di kursi dewan meningkat dibandingkan periode 2009-2014 yang hanya sebanyak 16 orang. Perolehan suara terbanyak juga diisi oleh perempuan yaitu Irna Setiawati yang memperoleh suara 155.180 suara. Wajah baru di dewan sebanyak 64 orang sedangkan sisanya incumbent. Partisipasi Pemilu Legislatif 2014, juga mengalami peningkatan menjadi rata-rata di 35 kabupaten/kota sebesar 73,94 persen.

Dengan data itu, maka bisa dikatakan Jawa Tengah berhasil menciptakan stabilitas dan kondusifitas politik. Kondisi masyarakat Jawa Tengah yang majemuk dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya dan keamanan dapat dipelihara, diatur dan dikendalikan dengan baik.

Meski demikian, sejarah konflik politik juga pernah mewarnai perjalanan panjang provinsi Jawa Tengah ini. Saat awal kemerdekaan peristiwa pemberontakan DI/TII juga berimbas ke Jawa Tengah. Awalnya, pada 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya Jawa Barat, Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo memproklamlirkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Gerakannya dinamakan Darul Islam (DI) sedang tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan politik ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar

negara. Dalam proklamasinya, hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam.

Gerakan angkat senjata yang dilakukan Kartosuwirjo tidak hanya dijalankan di Tasikmalaya, tetapi juga merembet ke daerah lain, termasuk di Jawa Tengah. Gerakan DI/TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah dan Moh. Mahfudh Abdul Rachman (Kiai Sumolangu) yang bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan.

Karena konflik ini sudah mengangkat senjata, akhirnya pemerintah Indonesia menurunkan pasukan untuk menumpas dan merepdam konflik senjata ini. Di Jawa Tengah, pada bulan Januari 1950 pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut Gerakan Banteng Negara (GBN).

Di daerah Kebumen juga muncul pemberontakan yang merupakan bagian dari DI/ TII, yakni dilakukan oleh “Angkatan Umat Islam (AUI)” yang dipimpin oleh Kyai Moh. Mahfudz Abdurachman yang dikenal sebagai “Romo Pusat” atau Kyai Somalangu. Untuk menumpas pemberontakan ini memerlukan waktu kurang lebih tiga bulan. Pemberontakan DI/TII juga terjadi di daerah Kudus dan Magelang yang dilakukan oleh Batalyon 426 yang bergabung dengan DI/TII pada bulan Desember 1951, tetapi pemberontakan dan konflik ini mampu dredam pemerintah saat itu.

Konflik politik di Jawa Tengah juga pernah terjadi saat Pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965. Konflik yang menandai berakhirnya periode orde lama menuju era yang disebut orde baru ini sebenarnya berpusat konflik berada di Jakarta, tetapi imbasnya sangat luas di berbagai daerah lain-nya, termasuk di Jawa Tengah.

Sebenarnya, konflik partai-partai Islam dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) telah lama terjadi jauh sebelum 1965. Ketegangan dalam bentuk konflik fisik sudah terjadi sejak September 1948. Pada tahun itu para milisi-milisi PKI membantai para pejabat yang terkait dengan Masyumi dan PNI. Modusnya, orang-orang Masyumi tampak sebagai

korban satu-satunya; kadang mereka sebatas diram-pok, tapi tidak jarang pula disiksa dan dibantai.

Pada tahun 1965 PKI melancarkan serangan dengan menculik beberapa jen-deral pada tengah malam 30 September 1965. Para pejabat yang menjadi korban adalah: (1) Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi), (2) Mayjen TNI Raden Suprpto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi), (3) Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan), (4) Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen), (5) Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik), (6) Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat).

Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, pu-trinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Pasca kejadian tersebut suasana menjadi tegang dan pada akhirnya penumpasan terhadap PKI tidak bisa lagi dielakkan. Ini salah satunya karena ABRI didukung penuh oleh organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah dalam memerangi PKI dan antek-anteknya.

Reaksi terhadap aksi G-30-S/PKI 1 Oktober 1965 di tiap daerah berbeda-beda bentuknya. Tetapi dapat dikatakan bahwa dukungan yang cukup kuat terhadap kekuatan G-30-S/PKI, selain di Jakarta, hanya terlihat di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada hari itu juga, pukul 13.00, melalui RRI Semarang, Asisten I Kodam VII/Diponegoro, Kolonel Sahirman mengumumkan dukungannya terhadap G-30-S/PKI. Pihak yang pro-G-30-S/PKI berhasil menguasai Markas Kodam VII/Diponegoro yang kemudian dijadikan pusat gerakannya. Waktu itu, Panglima Kodam VII/Diponegoro Brigadir Jenderal Surjo-sumpena

sedang berada di luar kota. Di samping Markas Kodam, juga beberapa Markas Komando Resort Militer (Makorem) berhasil mereka kuasai, seperti Makorem Purwekerto, Makorem Yogyakarta, dan Makorem Salatiga.

Dewan Revolusi di Yogyakarta diketuai oleh Mayor Mulyono. Dengan menggunakan kekuatan Batalyon I, mereka menculik kepala Staf Korem 072 Yogyakarta, Letkol TNI Sugijono. Selanjutnya mereka mengeluarkan perintah kepada segenap Komando Distrik Militer (Kodim) supaya mendukung G-30-S/PKI dan membagi-bagikan senjata kepada anggota Legiun Veteran setempat. Keesokan harinya, 2 Oktober 1965 terjadi demonstrasi para anggota PKI dan ormas-ormasnya di depan Makorem 072 untuk menyatakan dukungannya kepada G-30-S/PKI. Pada hari itu juga Komandan Korem 072 Kolonel Katamsa diculik dari rumahnya dan dibawa ke kompleks Batalyon I di desa Kentung. Selanjutnya ia bersama dengan Letkol Sugijono dibunuh.

Di kota Solo pada 1 Oktober, Dewan Revolusi setempat telah menggunakan Batalyon M untuk melakukan penculikan terhadap Komandan Brigade 6 Kolonel Azahari, Kepala Staf Brigade 6 Letkol Prawoto, Komandan Kodim 0735 Letkol Ezi Soeharto, Kepala Staf Kodim 735 Mayor Soeparjan, Komandan Polisi Militer Detasemen Surakarta Kapten Prawoto, dan Komandan Batalyon M Mayor Darso. Kekuatan Dewan Revolusi juga menduduki gedung RRI, Telekomunikasi, dan Bank Negara Indonesia Unit I.

Keesokan harinya Walikota Solo, Oetomo melalui RRI dengan mencatat nama Front Nasional cabang Surakarta mengumumkan dukungannya kepada G-30-S/PKI. Sementara itu, Pangdam Diponegoro Brigjen Surjo-sumpeno yang telah mendengar siaran RRI tentang adanya G-30-S/PKI dan Dewan Revolusi, secepatnya menghubungi para perwira stafnya di Jawa Tengah untuk mengadakan briefing. Kemudian ia menerima pula informasi tentang pengambilalihan Markas Kodam dan beberapa Makorem di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Oleh karena itu secara hati-hati dia menghubungi pasukan-pasukan yang dinilai tidak dipengaruhi kekuatan G-30-S/PKI dan Dewan Revolusinya. Setelah berhasil melakukan konsolidasi, maka diputuskan untuk menggerakkan pasukan guna menumpas kekuatan G-30-S/PKI tersebut. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 2 Oktober 1965 pada pukul 05.00. Ternyata setelah ada siaran RRI Jakarta yang menyebutkan bahwa Jakarta telah dikuasai kembali oleh ABRI, maka pasukan-pasukan yang dipergunakan oleh kekuatan G-30-S/PKI mulai tidak kompak. Oleh karena itu, pasukan yang digerakkan Surjosumpeno tidak menemui perlawanan ketika merebut kembali kota Semarang. Kolonel Sahirman dan perwira lainnya telah melarikan diri keluar kota dikawal oleh dua kompi anggota Batalyon X pimpinan Mayor Kadri.

Sebagian lagi dari Batalyon K itu dapat disadarkan kembali atas keterlibatannya dengan G-30-S/PKI. Pada pukul 10.00 hari itu juga, Pangdam VII/Diponegoro mengumumkan melalui RRI setempat bahwa Pangdam Brigjen Surjosumpeno telah mengambil alih kembali pimpinan Kodam VII/ Diponegoro. Dalam operasi Merapi itu, beberapa pimpinan militer G-30-S/PKI dan Dewan Revolusi Jawa Tengah berhasil ditembak mati, seperti Kolonel Sahirman, Kolonel Maryono, Letnan Kolonel Usman, Mayor Sumadi, Mayor R. W. Sakirno, dan Kapten Sukarno.

Menurut pernyataan resmi ABRI, dalam operasi pembersihan itulah, pada 2 Oktober 1965, tokoh nomor satu PKI D.N. Aidit berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Solo. Menurut pihak ABRI, Aidit terpaksa ditembak mati karena berusaha melarikan diri. Setelah kekuatan militernya cerai berai dan gembong-gembongnya tertangkap atau tertembak mati, maka secara militer kekuatan G-30-S/PKI di Jawa Tengah dinilai telah hancur.³

Di awal era reformasi, konflik politik juga melanda Jawa Tengah. Salah satu kasus konflik politik yang cukup besar adalah kasus pertikaian

³ Muhammad Iskandar, Linda Sunarti dan Abdurrahman, 20013, *Sejarah Indonesia dalam Perkembangan Zaman*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 45-49

pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Konflik berdarah ini terjadi pada awal reformasi, pada Pemilu 1999. Konflik ini muncul ketika ada acara deklarasi dan pengajian PKB Ranting Desa Dongos di rumah bapak Sutarmo pada tanggal 30 April 1999. PKB merupakan partai kontestan pemilu tahun 1999, yang merupakan titik balik dari sistem multi partai yang diterapkan pemerintah. Kenyataan ini dapat dilihat sebelum sistem multi partai berlaku. Masyarakat Dongos mayoritas berafiliasi politik ke PPP, namun demikian setelah muncul banyak partai baru yang bersamaan munculnya PKB yang dibentuk warga Nahdliyin, masyarakat Dongos yang notabene pendukung fanatik PPP seakan-akan tidak dapat menerima partai lain tumbuh dan berkembang.

Hal ini salah satunya karena keyakinan partai politik dianggap sebagai ideologi agama yang dijadikan panutan sehingga atas nama ideologi agama dipakai untuk memobilisasi massa. Mereka beranggapan bahwa partai Islam sebagai satu-satunya kendaraan untuk mencapai tujuan politik. Pada pihak lain beranggapan bahwa pandangan politiknya mengembangkan wawasan kebangsaan. Ketidaktahuan massa pendukung soal hubungan agama dan politik akibat politisasi agama untuk kepentingan sesaat mengakibatkan warga Nahdliyin di Desa Dongos saling bermusuhan. Dampak kerusuhan dari konflik politik ini adalah 4 orang meninggal dan puluhan orang luka-luka. Kerugian materiil yaitu 3 rumah terbakar serta 15 mobil dan 6 sepeda motor terbakar hangus.

Konflik ini disebabkan karena: Pertama, eskalasi dari konflik internal warga Nahdliyin yang bersifat ideologis. Kedua, masyarakat Dongos belum mengetahui hakekat demokrasi, mereka hanya tahu bahwa demokrasi itu adalah kebebasan, apalagi didukung terjadinya guncangan sosial dan budaya akibat dari penerapan sistem pemilu multi partai, maka kesempatan untuk melampiaskan kebebasan tersebut sangat besar. Ketiga, adanya kesamaan basis massa yakni sama-sama warga NU.

Keempat, adanya kesenjangan ekonomi yang tumpang tindih dengan persoalan politik yang memicu munculnya konflik.

Selain itu kerusuhan juga terjadi karena kurangnya komunikasi antara elit partai yang berkompetisi dengan massanya. Akibat dari tidak adanya komunikasi massa antar pendukung/simpatian kedua partai yang bertikai, maka tragedi politik berdarah itu bisa terjadi.⁴

Selain konflik-konflik politik yang melibatkan masyarakat, konflik di internal partai politik juga kerap melanda di wilayah ini. Konflik politik ini sering muncul di era reformasi, bahkan hingga hari ini. Kendati biasanya konflik utama berada di pusat pemerintahan, Jakarta, tetapi eksisnya merambah ke seluruh kabupaten/kota dan propinsi di seluruh Indonesia.

Konflik internal partai ini kemudian memunculkan dalam bentuknya, dualisme pengurus. Terjadi perebutan kepengurusan di internal partai politik. Banyak partai politik di negeri ini mengalami konflik dualisme kepengurusan. Partai Golkar sekitar satu tahun lalu belum menemukan titik temu terkait dualisme kepengurusan antara Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono. Begitu pula di PPP, kubu Romahurmuzi dan kubu Djian Farid masih terus berseteru untuk memperebutkan kepengurusan yang sah di partai masing-masing. Sepanjang era reformasi, berbagai partai mengalami konflik internal di dalamnya. PPP sempat terpecah menjadi PPP Reformasi sebelum akhirnya berganti nama menjadi PBR. Kemudian PKB pasca jatuhnya Gus Dur pada tahun 2001 dari kursi kepresidenan terbelah menjadi PKB Batutulis di bawah komando Matori Abdul Djilil dan PKB Kuningan di bawah komando Alwi Shihab dengan dukungan Gus Dur dan para kiai (ulama) kharismatik NU.

Perpecahan di tubuh partai yang kini marak juga dipengaruhi kondisi internal partai-partai yang pada umumnya masih merupakan

⁴ Sahidin, 2004, *Kala Demorasi Melahirkan Anarki; Potret Tragedi politik di Dongos*, Yogyakarta: Logung Pustaka, hlm. 31-40

partai tradisional, yang hanya aktif dan memiliki orientasi berkompetisi dalam pemilu, yang mengandalkan ikatan perekat antara organisasi dan dukungan massa melalui kharisma ketokohan, serta yang merepresentasikan diri sebagai partai aliran.

Di samping itu, data PPID menyebutkan bahwa akhir-akhir terdapat beberapa kejadian dapat berpotensi menimbulkan masalah politik. Antara lain adalah banyak terjadi konflik yang bersumber dari persoalan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di beberapa daerah yaitu Kab. Grobogan, Kab. Sragen, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar dan Kab. Pati. Konflik tersebut terjadi antar para pendukung kandidat yang memprotes proses maupun hasil Pilkades.

Kejadian lain adalah aksi yang berlatar belakang teror dari salah satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lain terjadi di Kota Surakarta dan Kab. Sukoharjo. Aksi tersebut mengarah pada sweeping yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan identitas agama tertentu (Islam) yang bertujuan untuk memberantas kemaksiatan di masyarakat (tumbuhnya cafe & karaoke) dan peredaran gelap narkoba.

Terkait dengan aspirasi, dalam beberapa bulan terakhir, aksi massa juga masih sering terjadi. Yang menarik adalah tuntutan mereka tentang Politik 5 kali, sosial budaya 6 kali dan tentang ekonomi hanya sekali.

Yang sering terjadi di Jateng adalah kekerasan religio politik yang dilakukan oleh sejumlah orang baik sebagai individu, kelompok atau organisasi yang mengarah kepada upaya-upaya terbentuknya Negara Islam dan dengan keinginan untuk menggunakan syariat Islam di dalam tatanan sosial dan negara. Desakan-desakan seperti itu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, meskipun para pelakunya memahami bahwa Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Pancasila dan Negara yang memiliki tingkat pluralitas yang tinggi baik dari segi suku, agama, ras, dan antar-golongan.

Latar belakang kemunculan gerakan radikalisme ini adalah karena teks suci keagamaan (Al Quran dan Hadist) bersifat terbuka, bisa ditafsirkan secara literal dan kontekstual, sehingga memunculkan berbagai kelompok keagamaan (moderat, radikal, fundamentalis, dsb) yang pada akhirnya melahirkan in group dan out group feeling dan evaluasi sepihak. Sering terjadi *overlapping* antara kepentingan agama dan kepentingan komunitas keagamaan.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa agama mampu membangkitkan emosi yang paling dalam sering dijadikan sebagai alat mobilisasi sosial. Kekerasan dengan kemasam agama menjadi sangat mungkin. Model-model perjuangan yang dipilih terkait dengan pencitraan keagamaan, dominasi budaya masyarakat, kekuatan dukungan sosial dan peran media.

Secara kategorial eksistensi ideologi mereka dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut. Secara sosiologis, fundamentalisme sering dikaitkan dengan nilai-nilai yang telah ketinggalan zaman atau tidak relevan lagi dengan perubahan dan perkembangan zaman; secara kultural, fundamentalisme menunjukkan kecenderungan kepada sesuatu yang vulgar dan tidak tertarik pada hal-hal yang bersifat intelektual; secara psikologis, fundamentalisme ditandai dengan otoritarianisme, arogansi, dan lebih condong kepada teori konspirasi. Secara intelektual, fundamentalisme dicirikan oleh tiadanya kesadaran sejarah dan ketidakmampuan terlibat dalam pemikiran kritis; dan secara teologis, fundamentalisme diidentikkan dengan literalisme, primitivisme, legalisme dan tribalisme; sedangkan secara politik, fundamentalisme dikaitkan dengan populisme reaksioner.⁵

Olivier Roy membedakan antara fundamentalisme Islam tradisional dan modern. Fundamentalisme tradisional memberikan otoritas sangat besar kepada ‘ulama untuk menafsirkan doktrin agama. Tafsir mereka pun bersifat absolut. Sedangkan fundamentalisme modern dicirikan oleh

⁵ Huff, 2002, “The Challenge of Fundamentalism for Interreligious Dialogue,” *Cross Current* (Spring-Summer, 2002)

orientasi yang kuat kepada politik dengan menjadikan Islam sebagai ideologi. Islam ditafsirkan sebagai ideologi yang diperhadapkan dengan ideologi modern seperti kapitalisme, liberalisme atau sosialisme. Mereka tidak dipimpin oleh ulama, tetapi oleh “intelektual sekuler” yang secara terbuka mengklaim sebagai pemikir religius. Mereka berpendapat bahwa karena semua pengetahuan itu bersifat ilahi dan religius; maka ahli kimia, teknik, insinyur, ekonomi, ahli hukum adalah ulama.⁶

Kaum fundamentalisme modern inilah yang sering dikatakan sebagai radikalisme Islam karena lahir sebagai reaksi munculnya nasionalisme sekular. Jika salafisme mendapatkan inspirasi dari ide-ide normatif Islam, dan modernisme berusaha untuk menggabungkan unsur-unsur Islam dan Barat, maka radikalisme Islam menggambarkan sintesis kreatif salafisme dan modernisme.⁷

B. Partisipasi Politik Jawa Tengah

1. Partisipasi Pemilu dan Pilkada

Partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan demokratisasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik. Perwujudan demokrasi di tingkat lokal, salah satunya dengan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan anggota legislatif (pileg) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Secara umum partisipasi masyarakat Jawa Tengah terhadap demokrasi di negeri ini tidak buruk. Keikutsertaan masyarakat untuk memilih dalam pemilu dan pilkada selama ini berada pada tingkat sedang-cukup bagus. Dari data yang dilansir KPU Jawa Tengah, rata-rata sejak

⁶ Olivier Roy, 1994, *The Failure of Political Islam* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press), hlm. 75

⁷ Youssef M Choueiri, *Islamic Fundamentalism*. (Boston: Twayne Publishers, 1990), 70.

pileg tahun 2004 hingga pilkada 2015 hasilnya cukup baik, yakni pada angka 69,87 %. Partisipasi masyarakat terendah yakni sebanyak 57,15% pada saat Pilgub tahun 2013, sedangkan yang tertinggi yakni di angka 83,50 % yang terjadi pada tahun pemilihan legislatif (pileg) tahun 2004.

Tabel Partisipasi Politik Jawa Tengah

| NO | KEGIATAN | PARTISIPASI |
|----|-------------------------|-------------|
| 1 | Pileg 2004 | 83.50 % |
| 2 | Pilpres 2004 (1) | 80.37 % |
| 3 | Pilpres 2004 (2) | 77.37 % |
| 4 | Pilkada 2005-2006 | 70.55 % |
| 5 | Pilgub 2008 | 59.44 % |
| 6 | Pileg 2009 | 72.43 % |
| 7 | Pilpres 2009 | 72.00 % |
| 8 | Pilkada (1) 2010 – 2013 | 61.58 % |
| 9 | Pilkada (2) 2010 – 2013 | 57.99 % |
| 10 | Pilgub 2013 | 57.15 % |
| 11 | Pileg 2014 | 74.72 % |
| 12 | Pilpres 2014 | 72.62 % |
| 13 | Pilkada 2015 Serentak | 68.54 % |
| | Rata-Rata | 69.87 % |

Sumber: diolah dari data KPU Jawa Tengah

Merujuk pada pelaksanaan pileg terakhir tahun 2014, jumlah partisipasi pemilih meningkat dibandingkan dengan pelaksanaan Pileg sebelumnya, tahun 2009. Bila pada pemilu tingkat partisipasi masyarakat berada di angka 72.43 persen, maka pada pileg 2014 partisipasinya meningkat menjadi 74,72 persen.

Tabel Jumlah DPT dan Perbandingan Jumlah Pemilih Jawa Tengah

| No | Kabupaten/ Kota | DPT | Jumlah Pemilih | Prosentase |
|----|--------------------|-----------|-------------------|------------|
| 1 | Cilacap | 1.476.371 | 964.687 | 65,34% |
| 2 | Banyumas | 1.324.314 | 940.902 | 71,05% |
| 3 | Purbalingga | 725.159 | 529.551 | 73,03% |
| 4 | Banjarnegara | 761.908 | 548.685 | 72,01% |
| 5 | Kebumen | 1.041.825 | 700.684 | 67,26% |
| 6 | Purworejo | 629.860 | 436.246 | 69,26% |
| 7 | Wonosobo | 656.243 | 493.562 | 75,21% |

| | | | | |
|----|-----------------|------------|------------|--------|
| 8 | Magelang | 959.133 | 783.541 | 81,69% |
| 9 | Boyolali | 799.596 | 638.399 | 79,84% |
| 10 | Klaten | 1.007.729 | 763.094 | 75,72% |
| 11 | Sukoharjo | 676.540 | 510.238 | 75,42% |
| 12 | Wonogiri | 908.304 | 600.715 | 66,14% |
| 13 | Karanganyar | 685.818 | 534.511 | 77,94% |
| 14 | Sragen | 775.333 | 566.690 | 73,09% |
| 15 | Grobogan | 1.096.951 | 785.296 | 71,59% |
| 16 | Blora | 700.629 | 535.717 | 76,46% |
| 17 | Rembang | 480.287 | 404.628 | 84,25% |
| 18 | Pati | 1.026.620 | 757.487 | 73,78% |
| 19 | Kudus | 600.872 | 488.920 | 81,37% |
| 20 | Jepara | 839.147 | 670.415 | 79,89% |
| 21 | Demak | 835.139 | 647.002 | 77,47% |
| 22 | Semarang | 750.083 | 602.170 | 80,28% |
| 23 | Temanggung | 582.524 | 492.438 | 84,54% |
| 24 | Kendal | 763.527 | 594.252 | 77,83% |
| 25 | Batang | 584.444 | 454.707 | 77,80% |
| 26 | Pekalongan | 709.185 | 513.186 | 72,36% |
| 27 | Pemalang | 1.104.650 | 710.508 | 64,32% |
| 28 | Tegal | 1.193.961 | 765.591 | 64,12% |
| 29 | Brebes | 1.487.556 | 955.511 | 64,23% |
| 30 | Kota Magelang | 94.397 | 75.280 | 79,75% |
| 31 | Kota Surakarta | 414.802 | 315.179 | 75,98% |
| 32 | Kota Salatiga | 130.007 | 107.792 | 82,91% |
| 33 | Kota Semarang | 1.126.304 | 845.955 | 75,11% |
| 34 | Kota Pekalongan | 218.657 | 173.797 | 79,48% |
| 35 | Kota Tegal | 200.039 | 137.199 | 68,59% |
| | JUMLAH | 27.367.914 | 20.044.535 | 74,72% |

Sumber: diolah dari data KPU Jawa Tengah

Sementara pada partisipasi masyarakat pada pilkada, maka dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel Partisipasi pada Pilkada Jawa Tengah

| Kabupaten/Kota | Pilkada 2005- 2006 | Pilkada 2010- 2013 (1) | Pilkada 2010- 2013 (2) | Pilkada 2015 |
|----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Cilacap | 67.84% | 62.89% | | |
| Banyumas | 72.96% | 66.29% | | |
| Purbalingga | 73.12% | 66.73% | | 60.06% |
| Banjarnegara | 72.97% | 69.21% | | |

| | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Kebumen | 71.81% | 63.16% | 57.17% | 64.75% |
| Purworejo | 74.95% | 62.86% | 58.80% | 61.75% |
| Wonosobo | 73.20% | 72.56% | | 72.84% |
| Magelang | 72.48% | 71.01% | | |
| Boyolali | 76.68% | 72.71% | | 78.65% |
| Klaten | 74.53% | 66.33% | | 66.11% |
| Sukoharjo | 72.45% | 65.83% | | 66.19% |
| Wonogiri | 68.96% | 65.57% | | 66.08% |
| Karanganyar | 68.94% | 70.98% | | |
| Sragen | 71.63% | 71.10% | | 70.40% |
| Grobogan | 69.92% | 67.65% | | 65.89% |
| Blora | 74.25% | 71.70% | | 71.61% |
| Rembang | 82.42% | 75.33% | | 73.35% |
| Pati | 51.78% | 72.38% | | |
| Kudus | 56.44% | 79.30% | | |
| Jepara | 55.07% | | | |
| Demak | 77.54% | 64.82% | | 67.73% |
| Semarang | 67.00% | 66.55% | | 69.99% |
| Temanggung | 80.93% | 82.89% | | |
| Kendal | 73.38% | 70.36% | | 67.46% |
| Batang | 77.66% | 76.76% | | |
| Pekalongan | 74.02% | 68.03% | | 69.89% |
| Pemalang | 64.94% | 56.62% | | 59.38% |
| Tegal | 57.20% | | | |
| Brebes | 58.97% | | | |
| Kota Magelang | 77.20% | 71.78% | | 75.23% |
| Kota Surakarta | 74.91% | 71.80% | | 73.08% |
| Kota Salatiga | 76.58% | 81.91% | | |
| Kota Semarang | 66.51% | 60.06% | | 65.48% |
| Kota Pekalongan | 67.95% | 70.04% | | 79.42% |
| Kota Tegal | 65.81% | | | |
| Rata-rata | 70.55% | 61.58% | 57.99% | 68.54% |

Dari data di atas, diketahui, dari tiga kali pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masing-masing kabupaten dan kota, partisipasi pemilih paling rendah terjadi di kabupaten Pati dengan angka partisipasi 51.78 persen pada saat Pilkada tahun 2005-2006, sedangkan yang paling tinggi partisipasi pemilih diraih oleh kabupaten Rembang dengan angka partisipasi mencapai 82.42 persen juga pada saat pelaksanaan Pilkada tahun 2005-2006.

Bila dibandingkan dengan tingkat partisipasi antara Pilkada dan Pileg di wilayah provinsi Jawa Tengah, maka tingkat partisipasi Pilkada lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi masyarakat pada saat Pemilu legislatif. Bila partisipasi Pilkada rata-rata berada pada angka 70,55 persen (Pilkada 2005-2006), angka 61,58 persen (Pilkada 2013) dan 68,54 persen (Pilkada 2015), maka pada pelaksanaan Pileg, tingkat partisipasi mencapai angka 83,50 persen (Pileg 2004), 72,43 persen (Pileg 2009), dan 74.72 persen (Pileg 2014).

2. Partisipasi Politik Berdasarkan PDRB

Partisipasi politik yang dilaksanakan oleh masyarakat pada endingnya, salah satunya diketahui melalui pemberian suara, atau vote pada saat pemilu berlangsung, baik pada pemilu legislatif, pemilu Presiden maupun Pilkada. Hal ini karena melalui vote adalah merupakan elemen penting yang dilihat secara fisik serta dapat diukur dan diteliti baik dengan pendekatan secara kualitatif, maupun kuantitatif.

Berdasarkan data yang dilansir KPU Jawa Tengah terhadap beberapa kali penyelenggaraan pileg, pilpres dan pilkada. Ada fakta-fakta menarik yang cukup menjadi perhatian. Yakni perbandingan antara partisipasi politik masyarakat dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah masyarakat tersebut. Dalam konteks ini peneliti membagi wilayah Jawa Tengah ke dalam tiga kategori PDRB di daerah masing-masing, yakni wilayah PDRB rendah, Wilayah PDRB sedang, dan Wilayah PDRB tinggi. Klasifikasi ini oleh peneliti digunakan untuk memudahkan pemotretan pola partisipasi politik masyarakat di wilayah tersebut.

Daerah kabupaten atau kota yang masuk kategori PDRB rendah oleh peneliti diidentifikasi melalui dengan daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang memiliki PDRB 0 - 20.000.000 juta rupiah. Sedangkan daerah yang masuk dengan kategori PDRB sedang adalah daerah kabupaten atau kota yang memiliki PDRB 20.000.000 juta rupiah hingga

50.000.000 juta rupiah. Sedang daerah dengan PDRB lebih dari 50.000 juta rupiah, maka oleh peneliti diklasifikasikan dengan daerah PDRB tinggi. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan data PDRB tiga tahun terakhir, yakni pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014.

a. Partisipasi Politik pada Daerah PDRB Rendah

Seperti yang dijelaskan di atas, Daerah dengan PDRB rendah, adalah daerah dengan daerah dengan PDRB yang kurang dari 20.000.000 juta rupiah. Dari 35 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah, yang masuk dalam kategori daerah PDRB rendah ini adalah 22 wilayah kabupaten dan kota. Wilayah tersebut meliputi kabupaten Purbalingga, kabupaten Banjarnegara, kabupaten Kebumen, kabupaten Purworejo, kabupaten Wonosobo, kabupaten Magelang, kabupaten Boyolali, kabupaten Wonogiri, kabupaten Grobogan, kabupaten Blora, kabupaten Rembang, kabupaten Jepara, kabupaten Demak, kabupaten Temanggung, kabupaten Batang, kabupaten Pekalongan, kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal, kota Magelang, kota Salatiga, kota Pekalongan dan kota Tegal.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah PDRB di daerah klasifikasi PDRB rendah terlihat pada tabel berikut:

Tabel Produk Domestik Regional Bruto Daerah PDRB Rendah
(dalam juta rupiah)

| Kabupaten/Kota | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kab Purbalingga | 12.138.445,34 | 12.819.159,66 | 13.554.296,77 |
| Kab Banjarnegara | 10.473.363,43 | 11.024.783,01 | 11.583.435,69 |
| Kab Kebumen | 13.707.057,24 | 14.344.827,43 | 15.176.441,62 |
| Kab Purworejo | 9.406.242,93 | 9.886.889,95 | 10.344.988,27 |
| Kab Wonosobo | 9.935.905,32 | 10.457.817,95 | 10.892.939,11 |
| Kab Magelang | 16.071.142,55 | 17.083.608,71 | 17.915.809,49 |
| Kab Boyolali | 15.369.974,36 | 16.265.748,68 | 17.085.661,59 |
| Kab Wonogiri | 14.605.088,22 | 15.305.297,58 | 16.109.707,79 |
| Kab Grobogan | 13.842.047,14 | 14.471.228,93 | 15.053.762,36 |
| Kab Blora | 11.116.865,90 | 11.712.504,85 | 12.227.201,29 |
| Kab Rembang | 9.277.163,23 | 9.778.950,39 | 10.282.184,04 |
| Kab Jepara | 14.824.995,87 | 15.602.868,53 | 16.326.957,62 |
| Kab Demak | 12.823.227,04 | 13.499.226,47 | 14.075.691,75 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Kab Temanggung | 10.740.983,02 | 11.400.498,28 | 11.987.831,59 |
| Kab Batang | 10.488.456,63 | 11.101.126,78 | 11.690.342,11 |
| Kab Pekalongan | 11.354.849,90 | 12.034.805,89 | 12.627.134,32 |
| Kab Pemasang | 12.477.235,25 | 13.166.859,41 | 13.893.576,37 |
| Kab Tegal | 16.912.249,74 | 18.053.605,08 | 18.955.755,71 |
| Kota Magelang | 4.484.268,08 | 4.755.269,18 | 4.987.376,44 |
| Kota Salatiga | 6.574.907,26 | 6.986.909,99 | 7.322.580,36 |
| Kota Pekalongan | 5.151.813,52 | 5.456.187,06 | 5.755.282,26 |
| Kota Tegal | 7.650.479,56 | 8.067.375,73 | 8.473.076,16 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa daerah di provinsi Jawa Tengah yang memiliki PDRB kurang dari 20.000.000 juta rupiah atau masuk dalam kategori PDRB rendah adalah sebanyak 22 daerah kabupaten dan kota yang terdiri atas 18 wilayah kabupaten dan 4 wilayah kota madya.

Pada tiga tahun terakhir, di provinsi Jawa Tengah, wilayah yang memiliki PDRB paling rendah adalah kota Magelang dengan PDRB tahun 2012 sebanyak 4.484.268,08 juta rupiah, tahun 2013 sebanyak 4.755.269,18 juta rupiah dan tahun 2014 sebanyak 4.987.376,44 juta rupiah. Sementara pada klasifikasi rendah ini dari 22 daerah, yang memiliki PDRB paling tinggi adalah kabupaten Magelang dengan perolehan PDRB tahun 2012 sebanyak 16.071.142,55 juta rupiah, tahun 2013 sebanyak 17.083.608,71 juta rupiah dan tahun 2014 sebanyak 17.915.809,49 juta rupiah.

Dari klasifikasi pada wilayah PDRB rendah ini, jumlah partisipasi politik, baik mulai pada Pemilu 2004 hingga terakhir Pilkada serentak tahun 2015, dapat terlihat sebagaimana tabel di bawah.

Tabel Partisipasi Pileg Jawa Tengah Tahun 2004, 2009 dan 2014

| Kabupaten/Kota | Pileg 2004 | Pileg 2009 | Pileg 2014 |
|------------------|------------|------------|------------|
| Kab Purbalingga | 81.30% | 71.23% | 69.82% |
| Kab Banjarnegara | 83.24% | 71.66% | 68.97% |
| Kab Kebumen | 82.30% | 68.00% | 65.96% |

| | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Kab Purworejo | 84.91% | 67.90% | 68.62% |
| Kab Wonosobo | 87.09% | 76.41% | 74.23% |
| Kab Magelang | 87.99% | 79.93% | 79.54% |
| Kab Boyolali | 84.95% | 74.94% | 75.53% |
| Kab Wonogiri | 80.37% | 66.52% | 66.74% |
| Kab Grobogan | 80.00% | 71.89% | 66.40% |
| Kab Blora | 84.47% | 74.44% | 71.61% |
| Kab Rembang | 84.79% | 82.76% | 77.98% |
| Kab Jepara | 78.00% | 71.65% | 73.49% |
| Kab Demak | 83.37% | 72.67% | 71.08% |
| Kab Temanggung | 85.27% | 82.57% | 83.37% |
| Kab Batang | 88.45% | 75.41% | 73.07% |
| Kab Pekalongan | 83.91% | 69.35% | 67.30% |
| Kab Pemasang | 79.79% | 63.32% | 61.64% |
| Kab Tegal | 79.09% | 62.09% | 62.53% |
| Kota Magelang | 85.75% | 75.81% | 79.21% |
| Kota Salatiga | 85.29% | 82.32% | 81.78% |
| Kota Pekalongan | 84.77% | 74.50% | 75.83% |
| Kota Tegal | 79.31% | 66.94% | 67.14% |

Sumber: diolah dari data KPU Jawa Tengah

Dari di atas di ketahui, pada wilayah dengan PDRB rendah, ternyata partisipasi politik masyarakat cukup tinggi. Dari 22 wilayah kabupaten dan kota tersebut, pada pileg 2004 hingga pileg 2014, rata-rata sekitar 70 persen partisipasinya. Partisipasi terendah pada jumlah pemilih pada pileg 2014 berada di kabupaten Pemasang sebesar 61,64 persen, sementara yang tertinggi pada kabupaten Temanggung dengan jumlah 83,37 persen. Sedangkan pada Pileg 2009, terendah jumlah partisipasi pemilih terjadi di kabupaten Tegal dengan 62,09 persen dan tertinggi berada pada kabupaten kabupaten Rembang dengan 82,76 persen. Sementara pada penyelenggaraan Pileg 2004, semua partisipasi di atas 78 persen. Tertinggi berada pada kabupaten Batang dengan peroleh 88, 45 persen dan terendah pada kabupaten Jepara sebanyak 78,00 persen.

Tabel Data Partisipasi Pilpres Jawa Tengah Tahun 2004, 2009 dan 2014

| Kabupaten/Kota | Pilpres 2004 (1) | Pilpres 2004 (2) | Pilpres 2009 | Pilpres 2014 |
|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Kab Purbalingga | 78.39% | 75.03% | 70.66% | 73.03% |
| Kab Banjarnegara | 79.47% | 75.85% | 69.47% | 72.01% |
| Kab Kebumen | 79.90% | 78.30% | 69.24% | 67.26% |
| Kab Purworejo | 82.56% | 80.47% | 76.23% | 69.26% |
| Kab Wonosobo | 85.07% | 82.54% | 79.67% | 75.21% |
| Kab Magelang | 86.25% | 84.65% | 73.55% | 81.69% |
| Kab Boyolali | 81.76% | 78.49% | 71.49% | 79.84% |
| Kab Wonogiri | 75.28% | 74.30% | 72.97% | 66.14% |
| Kab Grobogan | 75.26% | 72.18% | 69.52% | 71.59% |
| Kab Blora | 81.06% | 79.33% | 72.29% | 76.46% |
| Kab Rembang | 82.25% | 78.30% | 75.44% | 84.25% |
| Kab Jepara | 78.79% | 72.28% | 70.51% | 79.89% |
| Kab Demak | 77.63% | 72.53% | 70.01% | 77.47% |
| Kab Temanggung | 88.55% | 85.60% | 82.17% | 84.54% |
| Kab Batang | 82.76% | 79.53% | 75.48% | 77.80% |
| Kab Pekalongan | 79.83% | 75.48% | 67.19% | 72.36% |
| Kab Pemalang | 76.38% | 72.58% | 63.43% | 64.32% |
| Kab Tegal | 75.96% | 71.61% | 63.13% | 64.12% |
| Kota Magelang | 83.84% | 83.33% | 77.76% | 79.75% |
| Kota Salatiga | 80.93% | 80.11% | 80.67% | 82.37% |
| Kota Pekalongan | 82.00% | 75.77% | 73.91% | 79.48% |
| Kota Tegal | 76.90% | 73.18% | 69.26% | 68.59% |

Sumber: diolah dari data KPU Jawa Tengah

Dari data di atas diketahui partisipasi masyarakat pada wilayah PDRB rendah pada pemilihan presiden baik pada tahun 2004, 2009 ataupun tahun 2014 juga sama, cukup tinggi. Pada pilpres 2014, yang terendah hanya di angka 64,12 persen yang terjadi di kabupaten Tegal dan tertinggi terjadi di kabupaten Temanggung dengan angka 84, 54 persen.

Tabel Data Partisipasi Pilgub Jawa Tengah Tahun 2008 dan Pilgub 2013

| Kabupaten/Kota | Pilgub 2008 | Pilgub 2013 |
|------------------|-------------|-------------|
| Kab Purbalingga | 63.86% | 58.87% |
| Kab Banjarnegara | 62.16% | 56.37% |

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| Kab Kebumen | 65.79% | 57.39% |
| Kab Purworejo | 62.46% | 58.65% |
| Kab Wonosobo | 70.35% | 62.14% |
| Kab Magelang | 73.44% | 71.31% |
| Kab Boyolali | 59.41% | 61.38% |
| Kab Wonogiri | 61.20% | 56.50% |
| Kab Grobogan | 50.74% | 45.78% |
| Kab Blora | 61.74% | 55.88% |
| Kab Rembang | 60.45% | 51.52% |
| Kab Jepara | 43.80% | 44.85% |
| Kab Demak | 44.01% | 44.92% |
| Kab Temanggung | 81.06% | 82.89% |
| Kab Batang | 61.77% | 56.47% |
| Kab Pekalongan | 54.18% | 46.94% |
| Kab Pemasang | 53.26% | 46.76% |
| Kab Tegal | 54.77% | 48.49% |
| Kota Magelang | 69.21% | 66.70% |
| Kota Salatiga | 67.61% | 68.68% |
| Kota Pekalongan | 53.11% | 47.45% |
| Kota Tegal | 62.71% | 54.25% |

Sumber: diolah dari data KPU Jawa Tengah

Dari data di atas, partisipasi pada pemilihan Gubernur (pilgub) cukup menggembirakan. Beberapa daerah, mengalami peningkatan jumlah partisipasi pada saat pelaksanaan Pilgub 2013, dibandingkan dengan Pilgub sebelumnya pada tahun 2008. Seperti yang terlihat pada kabupaten Jepara dan Demak. Pada Pilgub 2008 partisipasi pemilih di kabupaten Jepara 43,80 persen, dan meningkat pada pelaksanaan Pilgub tahun 2013 menjadi 44,85 persen. Begitu pula di kabupaten Demak, pada pilgub tahun 2008 partisipasi pemilih 44, 01 persen naik menjadi 44,92 persen pada Pilgub tahun 2013. Kabupaten Temanggung yang merupakan jumlah tertinggi partisipasi pemilih pada pilgub ini, juga mengalami peningkatan. Pada pilgub tahun 2008 jumlah partisipasi sebanyak 81, 06 persen mengalami peningkatan menjadi 82,89 persen pada pilgub tahun 2013.

**Tabel Data Partisipasi Pilkada Jawa Tengah Tahun 2005-2006,
Pilkada 2010-2013 dan Pilkada 2015**

| Kabupaten/Kota | Pilkada 2005- 2006 | Pilkada 2010- 2013 (1) | Pilkada 2010- 2013 (2) | Pilkada 2015 |
|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Kab Purbalingga | 73.12% | 66.73% | - | 60.06% |
| Kab Banjarnegara | 72.97% | 69.21% | - | - |
| Kab Kebumen | 71.81% | 63.16% | 57.17% | 64.75% |
| Kab Purworejo | 74.95% | 62.86% | 58.80% | 61.75% |
| Kab Wonosobo | 73.20% | 72.56% | - | 72.84% |
| Kab Magelang | 72.48% | 71.01% | - | - |
| Kab Boyolali | 76.68% | 72.71% | - | 78.65% |
| Kab Wonogiri | 68.96% | 65.57% | - | 66.08% |
| Kab Grobogan | 69.92% | 67.65% | - | 65.89% |
| Kab Blora | 74.25% | 71.70% | - | 71.61% |
| Kab Rembang | 82.42% | 75.33% | - | 73.35% |
| Kab Jepara | 55.07% | - | - | - |
| Kab Demak | 77.54% | 64.82% | - | 67.73% |
| Kab Temanggung | 80.93% | 82.89% | - | - |
| Kab Batang | 77.66% | 76.76% | - | - |
| Kab Pekalongan | 74.02% | 68.03% | - | 69.89% |
| Kab Pemalang | 64.94% | 56.62% | - | 59.38% |
| Kab Tegal | 57.20% | - | - | - |
| Kota Magelang | 77.20% | 71.78% | - | 75.23% |
| Kota Salatiga | 76.58% | 81.91% | - | - |
| Kota Pekalongan | 67.95% | 70.04% | - | 79.42% |
| Kota Tegal | 65.81% | - | - | - |

Sumber: diolah dari data KPU Jawa Tengah

Dari data partisipasi saat pilkada pada wilayah dengan PDRB rendah seperti data di atas, diperoleh gambaran bahwa partisipasi daerah-daerah tersebut cukup tinggi dalam hal jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya dalam pilkada. Pada pilkada 2015, terendah partisipasi pemilih berada di angka 59,38 persen di kabupaten pemalang dan tertinggi berada di kabupaten pekalongan yang mencapai angka 79,42 persen. Partisipasi ini adalah angka yang cukup tinggi. Pada pemilihan lepa daerah tahun sebelumnya, yakni yang terjadi pada tahun 2010-2013, partisipasi terendah terjadi pada

kabupaten Pemalang dengan 56,62 persen dan tertinggi diraih oleh kabupaten Salatiga dengan angka 81,91 persen.

Dari data-data yang telah dijabarkan di atas, yakni data partisipasi Pileg, partisipasi Pilpres, partisipasi Pilgub dan partisipasi Pilkada, diperoleh gambaran rata-rata daerah dengan PDRB rendah, jumlah partisipasi pemilih dalam pemilihan cukup tinggi. Bila data-data tersebut digabung, angka partisipasi tertinggi bahkan sampai menyentuh angka 88,55 persen yang terjadi pada saat pelaksanaan Pilpres tahun 2004 (gelombang pertama) yang berada di kabupaten Temanggung dan angka terendah adalah di angka 43,80 persen yang terjadi saat pelaksanaan Pilgub tahun 2008 di kabupaten Jepara.

Selain itu, bila data-data partisipasi di wilayah dengan PDRB rendah ini, disandingkan mulai pada Pileg 2004 hingga pilkada 2015, maka kabupaten Temanggung adalah kabupaten yang paling tinggi partisipasi jumlah pemilihnya. Dari 11 kali pemilihan umum yang dilaksanakan, mulai dari Pileg 2004 hingga terakhir Pilpres 2014, angka partisipasi pemilih tidak kurang dari 80 persen, dengan pencapaian tertinggi pada angka 88,55 persen pada saat Pilpres 2004 dan terendah dengan angka 80,93 persen saat penyelenggaraan Pilkada tahun 200-2006.

Sedangkan kabupaten dengan partisipasi pemilih terendah terjadi pada kabupaten Pemalang. Dari 12 kali penyelenggaraan Pileg, Pilpres, Pilgub dan Pilkada ini, angka terendah berada pada angka 46,76 persen pada saat Pilgub 2013 dan angka partisipasi pemilih tertinggi berada pada 79,79 persen saat Pileg 2004.

b. Partisipasi Politik Daerah PDRB sedang

Daerah dengan PDRB sedang adalah wilayah kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang memiliki PDRB antara 20.000.000 - 50.000.000 juta rupiah. Dari 35 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah, yang masuk dalam kategori daerah PDRB sedang ini sebanyak adalah 10 wilayah yang terdiri atas 9 kabupaten dan 1 kota

madya. Wilayah tersebut meliputi kabupaten Banyumas, kabupaten Klaten, kabupaten Sukorejo, kabupaten Karanganyar, kabupaten Sragen, kabupaten Pati, kabupaten Semarang, kabupaten kendal, kabupaten Brebes, Kota Surakarta.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah PDRB di daerah klasifikasi PDRB sedang dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel Produk Domestik Regional Bruto Daerah PDRB Sedang
(dalam juta rupiah)

| Kabupaten/Kota | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Kab Banyumas | 25.982.158,22 | 27.772.165,06 | 29.098.389,63 |
| Kab Klaten | 19.102.402,71 | 20.299.990,92 | 21.391.717,78 |
| Kab Sukoharjo | 18.342.247,26 | 19.403.138,94 | 20.423.511,80 |
| Kab Karanganyar | 18.189.076,66 | 19.224.635,92 | 20.208.968,35 |
| Kab Sragen | 17.902.104,86 | 19.102.981,59 | 20.170.942,51 |
| Kab Pati | 21.072.328,70 | 22.314.753,78 | 23.327.059,31 |
| Kab Semarang | 24.306.718,35 | 25.976.021,08 | 27.534.876,57 |
| Kab Kendal | 21.075.717,33 | 22.324.823,54 | 23.463.053,00 |
| Kab Brebes | 22.482.262,67 | 23.823.556,92 | 25.091.713,29 |
| Kota Surakarta | 24.123.781,59 | 25.612.681,32 | 26.955.056,24 |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa daerah pada klasifikasi daerah dengan PDRB sedang, PDRB tertinggi selama tiga tahun terakhir, yakni tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 dipegang oleh kabupaten Banyumas dengan perolehan PDRB tahun 2012 sebanyak 25.982.158,22 juta rupiah, tahun 2013 sebanyak 27.772.165,06 juta rupiah dan tahun 2014 PDRB-nya sebanyak 29.098.389,63 juta rupiah. Sedangkan wilayah yang memiliki PDRB paling rendah dalam klasifikasi daerah PDRB sedang adalah kabupaten Sragen dengan PDRB tahun 2012 sebanyak 17.902.104,86 juta rupiah, tahun 2013 sebanyak 19.102.981,59 juta rupiah dan tahun 2014 sebanyak 20.170.942,51 juta rupiah.

Sementara itu, partisipasi politik yang terjadi pada wilayah dengan klasifikasi PDRB sedang ini dapat digambarkan pada tabel-tabel berikut:

Tabel Partisipasi Pileg Jawa Tengah Tahun 2004, 2009 dan 2014

| Kabupaten/Kota | Pileg 2004 | Pileg 2009 | Pileg 2014 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Kab Banyumas | 85.32% | 70.31% | 71.05% |
| Kab Klaten | 86.28% | 71.94% | 75.72% |
| Kab Sukoharjo | 76.74% | 70.61% | 75.42% |
| Kab Karanganyar | 83.79% | 75.00% | 77.94% |
| Kab Sragen | 84.83% | 72.05% | 73.09% |
| Kab Pati | 82.17% | 72.46% | 73.78% |
| Kab Semarang | 90.92% | 75.78% | 80.28% |
| Kab Kendal | 86.26% | 73.38% | 77.83% |
| Kab Brebes | 79.88% | 62.21% | 64.23% |
| Kota Surakarta | 83.90% | 71.80% | 75.98% |

Sumber: diolah dari data KPU Jawa Tengah

Data di atas menunjukkan pada pelaksanaan Pileg 2014, partisipasi tertinggi pada wilayah dengan PDRB sedang, diraih oleh kabupaten Semarang dengan 80,28 persen jumlah pemilih. Sedangkan terendah didapat oleh kabupaten Brebes dengan angka 64, 23 persen. Berbeda dengan pelaksanaan Pileg tahun 2009, yang tingkat partisipasinya jauh dibandingkan dengan Pileg 2014. Pada pelaksanaan Pileg 2009, tidak sampai pada 80 persen. Tertinggi hanya sampai pada angka 75,00 di kabupaten Karanganyar dan terendah di kabupaten Brebes dengan angka 62,21 persen. Sementara partisipasi di Pileg 2004 angkanya cukup tinggi, dengan partisipasi terbanyak pada kabupaten Semarang dengan 90,92 persen dan terendah pada kabupaten Sukoharjo di angka 76,74 persen.

Tabel Partisipasi Pilpres 2004, Pilpres 2009, dan Pilpres 2014

| Kabupaten/Kota | Pilpres 2004 (1) | Pilpres 2004 (2) | Pilpres 2009 | Pilpres 2014 |
|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Kab Banyumas | 83.21% | 81.07% | 73.50% | 72.63% |
| Kab Klaten | 84.35% | 81.53% | 71.60% | 74.76% |
| Kab Sukoharjo | 77.93% | 75.74% | 65.14% | 76.82% |

| | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Kab Karanganyar | 79.87% | 78.25% | 72.97% | 77.74% |
| Kab Sragen | 81.14% | 78.61% | 69.67% | 70.96% |
| Kab Pati | 77.65% | 74.93% | 68.48% | 71.91% |
| Kab Semarang | 83.15% | 80.87% | 75.67% | 78.50% |
| Kab Kendal | 83.49% | 80.57% | 73.42% | 74.62% |
| Kab Brebes | 76.74% | 71.60% | 64.01% | 61.59% |
| Kota Surakarta | 80.66% | 78.71% | 76.00% | 81.23% |

Sumber: diolah dari data KPU Jawa Tengah

Sementara pada data Pilpres sebagaimana data di atas, terlihat memang daerah dengan PDRB sedang sulit diprediksi partisipasinya. Terbukti angka partisipasinya tidak bisa diprediksi, kadang tinggi kadang rendah. Pada Pilpres 2004, partisipasi cukup tinggi dengan capaian tertinggi mencapai 83,49 persen di kabupaten Kendal dan terendah di angka 76,74 persen. Pada Pilpres 2009, tingkat partisipasi menurun, dengan jumlah tertinggi dicapai kabupaten Banyumas dengan angka 73,50 persen dan terendah di angka 64,01 di kabupaten Brebes. Sedangkan pilpres terakhir, tahun 2014 partisipasi di daerah dengan PDRB sedang sedikit ada kenaikan. Partisipasi tertinggi pada angka 81,23 persen, tetapi partisipasi terendah justru paling rendah di antara pilpres sebelumnya, yakni pada angka 61,59 di kabupaten Brebes.

Tabel Partisipasi Pilgub 2008 dan Pilgub 2013

| Kabupaten/Kota | Pilgub 2008 | Pilgub 2013 |
|-----------------|-------------|-------------|
| Kab Banyumas | 60.32% | 59.43% |
| Kab Klaten | 61.94% | 57.56% |
| Kab Sukoharjo | 61.80% | 61.52% |
| Kab Karanganyar | 64.33% | 61.64% |
| Kab Sragen | 62.57% | 52.11% |
| Kab Pati | 46.02% | 44.52% |
| Kab Semarang | 61.14% | 61.57% |
| Kab Kendal | 59.11% | 56.75% |
| Kab Brebes | 49.04% | 44.59% |
| Kota Surakarta | 62.11% | 64.47% |

Sumber: diolah dari data KPU Jawa Tengah

Dari data di atas, tingkat partisipasi masyarakat pada daerah dengan PDRB sedang, pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur tahun 2008 dan Pemilihan Gubernur tahun 2013 cukup kecil bila dibandingkan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden. Pada Pilgub tahun 2008 angka tertinggi hanya 64,33 persen di kabupaten Karanganyar dan terendah mencapai 46.02 persen di kabupaten Pati. Sedangkan pada Pilgub 2013, angka tertinggi berada pada kabupaten Surakarta dengan raihan partisipasi pemilih sebanyak 64,47 persen dan terendah juga sama-sama berada di kabupaten Pati sebanyak 44,52 persen.

Tabel Data Partisipasi Pilkada Jawa Tengah Tahun 2005-2006, Pilkada 2010-2013 dan Pilkada 2015

| Kabupaten/Kota | Pilkada 2005-2006 | Pilkada 2010-2013 (1) | Pilkada 2010-2013 (2) | Pilkada 2015 |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Kab Banyumas | 72.96% | 66.29% | - | - |
| Kab Klaten | 74.53% | 66.33% | - | 66.11% |
| Kab Sukoharjo | 72.45% | 65.83% | - | 66.19% |
| Kab Karanganyar | 68.94% | 70.98% | - | - |
| Kab Sragen | 71.63% | 71.10% | - | 70.40% |
| Kab Pati | 51.78% | 72.38% | - | - |
| Kab Semarang | 67.00% | 66.55% | - | 69.99% |
| Kab Kendal | 73.38% | 70.36% | - | 67.46% |
| Kab Brebes | 58.97% | - | - | - |
| Kota Surakarta | 74.91% | 71.80% | - | 73.08% |

Sumber: diolah dari data KPU Jawa Tengah

Dari data partisipasi pilkada pada daerah PDRB sedang seperti yang tergambar dalam tabel di atas, maka dapat diketahui, bahwa partisipasi pemilih di daerah dengan wilayah ini sulit diprediski. Artinya, ada daerah yang tinggi partisipasi politiknya, ada juga yang rendah partisipasi politiknya. Dari data partisipasi pilkada, ada yang

mencapai angka tertinggi sampai pada angka 74.91 persen, tetapi ada juga yang tingkat partisipasinya hanya pada angka 51.78 persen.

Dari data-data yang disajikan di atas, baik itu data partisipasi Pileg, partisipasi Pilpres, partisipasi Pilgub, dan partisipasi Pilkada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi pada daerah dengan PDRB sedang sulit ditebak. Artinya, tingkat partisipasi tidak diprediksi secara mudah, terkadang tinggi, terkadang rendah. Ini misalnya terjadi hampir rata di seluruh kabupaten dan kota pada wilayah PDRB rendah, saat menyelenggarakan Pileg dan Pilpres, maka partisipasi pemilih cukup tinggi, tetapi bila pelaksanaan Pilgub dan Pilkada, angka partisipasinya akan turun drastis.

c. Partisipasi Politik Daerah PDRB Tinggi

Dari klasifikasi peneliti, hanya ada tiga wilayah yang memiliki PDRB tinggi, yakni memiliki PDRB di atas 50.000.000 juta rupiah selama setahun. Tiga wilayah ini meliputi kota Semarang, yang merupakan jantung ibu kota Jawa Tengah, disusul kemudian dengan kabupaten Cilacap, dan kemudian kabupaten di pesisir utara Jawa, Kudus. Secara lebih jelas jumlah PDRB tiga wilayah kabupaten dan kota ini adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Tabel PDRB wilayah Klasifikasi PDRB Tinggi

| Kabupaten/Kota | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Kota Semarang | 91.282.029,07 | 97.340.978,65 | 102.501.385,64 |
| Kab Cilacap | 79.702.237,61 | 81.369.806,41 | 83.775.740,98 |
| Kab Kudus | 57.440.810,51 | 60.042.549,60 | 62.603.070,44 |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Dari data tersebut diketahui, kota Semarang menempati urutan peringkat pertama dengan PDRB tahun 2012 sebesar 91.282.029, 07 juta rupiah, tahun 2013 97.340.978,65 juta rupiah dan tahun 2013 sebesar 102.501.385,64 juta rupiah. Kabupaten Cilacap peringkat kedua, dengan PDRB terbesar pada tahun 2013 sebesar

83.775.740,98 juta rupiah dan kabupaten Kudus di peringkat ketiga dengan PDRB terbanyak tahun 2013 sebesar 62.603.070,44 juta rupiah.

Dari aspek partisipasi politik, tiga daerah ini juga cukup tinggi tingkat partisipasi politik masyarakatnya. Dari data yang dirilis KPU Jawa Tengah, mulai dari Pileg 2004 hingga hingga pilpres 2014, partisipasi politik warga di ketiga daerah ini cukup tinggi.

Tabel Partisipasi Pileg tahun 2004, 2009 dan 2014 pada wilayah PDRB Tinggi

| Kabupaten/Kota | Pileg 2004 | Pileg 2009 | Pileg 2014 |
|----------------|------------|------------|------------|
| Kota Semarang | 81,43% | 71,41% | 75,11% |
| Kab Cilacap | 83,56% | 68,49% | 65,27% |
| Kab Kudus | 82,56% | 77,42% | 73,78% |

Sumber: diolah dari data KPU Jawa Tengah

Dari data ini, partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pileg paling rendah pada angka 65,27 (2014) persen di kabupaten Cilacap dan paling tinggi tingkat partisipasinya sebanyak 83,56 persen juga di kabupaten Cilacap (2004)

Tabel Partisipasi Pilpres tahun 2004, 2009 dan 2014 pada wilayah PDRB Tinggi

| Kabupaten/Kota | Pilpres 2004 (1) | Pilpres 2004 (2) | Pilpres 2009 | Pilpres 2014 |
|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Kota Semarang | 79,34% | 77,34% | 78,75% | 79,88% |
| Kab Cilacap | 80,02% | 77,16% | 68,86% | 65,27% |
| Kab Kudus | 74,47% | 70,08% | 70,99% | 75,82% |

Sumber: diolah dari data KPU Jawa Tengah

Pada partisipasi Pilpres, angka partisipasi di wilayah dengan PDRB tinggi, persentase jumlah pemilih juga cukup tinggi. Artinya tingkat partisipasi warga pada pelaksanaan Pilpres juga cukup tinggi. Paling tinggi, memang pada pelaksanaan Pilpres pertama kali, yakni pada pilpres tahun 2004, tetapi partisipasi pada Pilpres tahun 2009

dan pelaksanaan pilpres tahun 2014 tingkat partisipasi masyarakat juga terlihat cukup tinggi.

Tabel Partisipasi Pilgub tahun 2008 dan 2013 pada Wilayah PDRB Tinggi

| Kabupaten/Kota | Pilgub 2008 | Pilgub 2013 |
|----------------|-------------|-------------|
| Kota Semarang | 62,85% | 61,45% |
| Kab Cilacap | 59,39% | 53,04% |
| Kab Kudus | 31,80% | 79,26% |

Sumber: diolah dari data KPU Jawa Tengah

Berbeda dengan data-data tertera pada Pileg dan Pilpres di atas, tingkat partisipasi pada Pilgub pada wilayah PDRB tinggi ini ada satu kali tingkat partisipasi yang begitu cukup rendah, yang hanya pada angka 31,80 persen. Tingkat partisipasi rendah tersebut berada pada pelaksanaan Pilgub tahun 2008 di kabupaten Kudus. Selebihnya data-data partisipasi Pilgub di wilayah lain pada klasifikasi PDRB tinggi ini cukup tinggi. Bahkan, di kabupaten Kudus, pada Pilgub tahun 2013 tingkat partisipasi meningkat cukup tajam menjadi 79,26 persen dari yang sebelumnya 31,80 persen.

Tabel Partisipasi Pilkada pada Wilayah PDRB Tinggi

| Kabupaten/Kota | Pilkada 2005-2006 | Pilkada 2010-2013 (1) | Pilkada 2010-2013 (2) | Pilkada 2015 |
|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Kota Semarang | 66,51 | 60,06 | - | 65,48 |
| Kab Cilacap | 67,84 | 62,89 | - | - |
| Kab Kudus | 56,44 | 79,30 | - | - |

Sumber: diolah dari data KPU Jawa Tengah

Dari tabel partisipasi pilkada di atas, paling rendah partisipasinya berada di kabupaten Kudus dengan angka 56,44 persen pada Pilkada 2005-2006 dan tertinggi juga diraih oleh Kudus dengan angka 79,30 persen partisipasinya pada pelaksanaan Pilakada 2010-2013.

Dari tabel-tabel yang disajikan di atas, mulai dari partisipasi Pileg, Pilpres, Pilgub dan Pilkada, pada wilayah dengan PDRB tinggi diketahui partisipasi masyarakat terhadap politik dengan ditandai partisipasi memilih yang cukup tinggi. Hanya sekali di kabupaten Kudus yang pernah mengalami kemerosotan pemilih yang cukup signifikan, yakni di kabupaten Kudus saat pemilihan gubernur tahun 2008, yakni hanya 31, 08 persen yang berpartisipasi. Selain itu, data-data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat pada wilayah dengan PDRB tinggi ternyata juga cukup tinggi.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Jawa Tengah

Partisipasi politik adalah interaksi individu atau organisasi politik dengan Negara yang diungkapkan melalui tindakan terorganisir melalui pemungutan suara, kampanye, dan protes dengan tujuan mempengaruhi wakil-wakil pemerintah.

Partisipasi sosial diartikan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai pewaris pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan disemua tahapan siklus pembangunan. Sedangkan partisipasi warga diartikan sebagai suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Eko Sutoro dalam Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, substansi partisipasi sesungguhnya adalah *voice*, akses, dan kontrol. Penjabarannya sebagai berikut:

a. Voice.

Merupakan hak dan tindakan warga masyarakat dalam mencari informasi, menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. *Voice* dapat disampaikan warga dalam banyak cara diantaranya: opini publik, referendum, media masa,

berbagai forum warga.

b. Akses.

Akses mengandung arti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area *governance* yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses yaitu: keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). Keduanya mempunyai persamaan tetapi berbeda titik tekannya. *Inclusion* menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat.

c. Kontrol.

Kontrol masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun *kebijakan* pemerintah. Kita mengenal kontrol internal (*self-control*) dan kontrol eksternal (*external control*). Artinya kontrol atau pengawasan bukan saja kontrol terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, tetapi juga kemampuan warga untuk melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap lingkungan dan perbuatan yang dilakukan mereka sendiri.

Selain itu, kita juga bisa melakukan modeling berdasarkan teori Deshler dan Sock (1985). Menurutnya, ada 3 tipe model partisipasi, yaitu: partisipasi semu (*pseudo participation*), partisipasi teknis (*technical participation*), dan partisipasi asli (*genuine participation*).

a. Partisipasi Semu (*pseudo participation*)

Partisipasi Semu sebenarnya bukan partisipasi, namun dibuat seolah-olah partisipatif. Partisipasi ini digunakan orang luar atau kelompok dominan (elite masyarakat) untuk kepentingannya sendiri, sedangkan masyarakat hanya sekedar obyek.

b. Partisipasi teknis (*technical participation*)

Partisipasi Teknis adalah keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, pengumpulan data, analisis data dan

pelaksanaan kegiatan. Pengembangan partisipasi dalam hal ini adalah sebuah taktik untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan praktis dalam konteks pengembangan masyarakat.

c. Partisipasi Asli (*genuine participation*).

Partisipasi asli ini sering juga dikenal dengan nama partisipasi politis, yakni keterlibatan masyarakat di dalam proses perubahan dengan melakukan refleksi kritis dan aksi yang meliputi dimensi politis, ekonomis, ilmiah dan ideologis, secara bersamaan. Pengembangan partisipasi dalam ini adalah pengembangan kekuasaan dan kontrol lebih besar terhadap suatu situasi melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan pilihan kegiatan dan berotonomi.

Di sisi lain, dari aspek masing-masing individu, faktor yang mempengaruhi partisipasi politik antar satu orang dengan lainnya juga terkadang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan yang ada dalam diri tiap manusia, seperti tingkat pendidikan, penghasilan dan pekerjaan anggota masyarakat. Menurut Soemanto R B, mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih tinggi derajat partisipasinya, hal ini karena dibawa oleh semakin kesadarannya terhadap politik. Hal ini berarti juga semakin tinggi derajat partisipasi terhadap program pemerintah.

Faktor pendidikan juga berpengaruh pada perilaku seseorang dalam menerima dan menolak suatu perubahan yang dirasakan baru. Masyarakat yang berpendidikan ada kecenderungan lebih mudah menerima inovasi jika ditinjau dari segi kemudahan (*accessibility*) atau dalam mendapatkan informasi yang mempengaruhi sikapnya. Seseorang yang mempunyai derajat pendidikan mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam menjangkau sumber informasi. Oleh karena itu, orang yang mempunyai pendidikan kuat akan tertanam rasa ingin tahu sehingga akan selalu berusaha untuk tahu tentang inovasi baru dari pengalaman-pengalaman belajar selama hidup.

Faktor penghasilan merupakan indikator status ekonomi seseorang, faktor ini mempunyai kecenderungan bahwa seseorang dengan status ekonomi tinggi pada umumnya status sosialnya tinggi pula. Dengan kondisi semacam ini mempunyai peranan besar yang dimainkan dalam masyarakat dan ada kecenderungan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan terutama gejala ini dominan di masyarakat pedesaan.

Secara lebih spesifik, ada beberapa perilaku pemilih (*voter behaviour*) dalam menyikapi pemilu. *Pertama*, pemilih yang mengedepankan rasionalitas nilai. Max Weber (dalam Banowo; 2008) mengemukakan rasionalitas nilai ialah pengambilan keputusan berdasarkan nilai yang dipegang teguh. Jika dikaitkan pemilu, rasionalitas nilai ini adalah bagaimana pemilih menjatuhkan pilihan pada calon yang akan dipilih, diyakini memiliki kesamaan nilai terutama nilai yang pokok dengan dirinya, baik itu agama, ras, etnis, dan lain-lain. Pemilih dengan rasionalitas nilai jumlahnya tidaklah sedikit di Indonesia. Di banyak pemilihan kepala daerah (pilkada), nilai-nilai primordial sering menguat dan dijadikan sebagai acuan pemilih dalam menentukan pilihan. Faktor suku dan agama lebih dominan ketimbang kapasitas, kredibilitas, dan integritas dari sang kandidat.

Kedua, pemilih dengan rasionalitas tujuan. Menurut Weber, rasionalitas tujuan adalah pola pikir yang bertumpu pada apa yang akan diperoleh. Pemilih memutuskan pilihannya pada calon yang dirasa dapat memenuhi keinginan dan kebutuhannya, meski hanya berupa sebagian kebahagiaan yang sifatnya sementara. Perilaku pemilih yang demikian menilai pemilu bukan lagi sarana untuk mencurahkan harapan kepada calon legislatif (caleg). Pemilih menganggap program dan janji yang ditawarkan caleg bukan hal yang menarik dan penting untuk diketahui. Acara hura-hura saat kampanye, pembagian sembako, dan kegiatan “amal” para caleg yang lebih dinanti-nanti. Sehingga dalam memutuskan pilihannya, berlaku hukum: “siapa yang bayar, akan dipilih”. Tetapi, pemilih yang demikian sangat pragmatis. Perilaku ini

muncul bukan tanpa sebab. Ini merupakan refleksi kekecewaan yang telah dialami. Keikutsertaan pada pemilu-pemilu lalu ternyata tidak berbuah apa-apa.

Ketiga, pemilih yang kritis. Pemilih kritis kecenderungannya ialah memiliki perhatian besar pada program kerja dan kebijakan parpol atau kandidat. Pemilih kritis akan menjadikan nilai-nilai ideologi sebagai pijakan untuk menentukan parpol mana yang akan dipilih, kemudian mengkritisi kebijakan atau program kerja yang akan atau yang telah dilakukan oleh parpol atau kandidat peserta pemilu. Mereka akan memilah-milah, mana politikus yang hanya berambisi pada kekuasaan, mana juga yang memang memiliki kompetensi. Kapasitas dan kapabilitas dinilai seperinci mungkin sehingga tidak sembarangan lagi memilih.

Keempat, pemilih skeptis. Pemilih skeptis tidak memiliki orientasi dengan ideologi, nilai, program kerja, dan kontestan tertentu. Mereka adalah kelompok masyarakat yang skeptis dan tidak yakin terhadap pemilu. Dalam pandangannya, parpol yang memenangkan pemilu tidak akan membawa dampak perubahan yang berarti. Walaupun berpartisipasi dalam pemilu, pemilih skeptis hanya menganggap pemilu sebagai ritual lima tahunan.

Kelima, adalah pemilih yang memilih untuk tidak memilih atau sering disebut golongan putih (golput). Memang, di Indonesia memilih merupakan hak, bukan kewajiban. Karena itu, yang memilikinya bisa memilih untuk menggunakan atau mengambil jalan golput. Angka golput di Indonesia terus meningkat. Golput di era reformasi ini kontras dengan era Orde Baru dulu. Di era Orde Baru, golput adalah murni berdasarkan keyakinan ideologis dan analisis politik rasional. Sedangkan di era reformasi, golput disebabkan dua hal, yakni kealpaan sistem administrasi dan pemilih menganggap tidak ada pilihan yang pantas

untuk dipilih.⁸

1. Faktor Partisipasi Politik pada wilayah PDRB Rendah

Sebagaimana disebutkan di atas, partisipasi politik pada daerah dengan PDRB rendah, ternyata memunculkan angka yang tinggi. Paling tidak di atas 65 persen di setiap daerah pada setiap penyelenggaraan pemilu, mulai dari Pileg, Pilpres, dan Pilkada.

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam politik, peneliti mengambil empat hal pokok yang menjadi kunci partisipasi politik. Keempat hal ini adalah budaya politik pemerintah, partai politik, calon dan pemilih. Budaya politik pemerintah ini adalah berbagai hal dan produk hukum serta peraturan yang mengatur secara teknis partisipasi masyarakat, dalam konteks ini yang mengatur penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu. Termasuk dalam hal ini adalah teknis administratif dari penyelenggara pemilu, yakni KPU yang dibentuk pemerintah dengan segala peraturan yang dikeluarkannya.

Yang kedua adalah partai politik. Partai politik yang berkiatan dengan partisipasi politik masyarakat, tentu saja hal ini salah satunya karena kinerja partai politik akan sangat menentukan masyarakat itu mau memilih apa tidak. Semakin baik kinerja dan produk dari partai politik tertentu dalam mengemban amanat rakyat, maka partai politik tersebut akan semakin dilirik. Sebaliknya, semakin partai itu mengecewakan rakyat, dengan banyaknya kasus korupsi misalnya, maka tentu akan semakin ditinggalkan pemilihnya.

Faktor ketiga adalah calon. Figur seorang calon akan semakin kuat berpengaruh terhadap pemilih, karena bagaimanapun, pemilu di negeri ini, masih kendatl dengan figur ayang akan laku “dijual”. Bahkan terkadang keberadaan figur, lebih menonjol dibanding partai

⁸ Muhammad Banowo, 2008, *Persepsi dan Perilaku Pemilih terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk*, Tesis (tidak dipublikasikan), Program Pascasarjana UNS: Surakarta

politik tertentu. Ini misalnya, akhir-akhir ini semakin banyak calon kepala daerah yang hadir dengan dukungan jalur independen. Artinya, keberadaan calon atau figur calon menjadi salah satu penentu yang efektif dalam mendulang perolehan suara atau partisipasi politik masyarakat.

Faktor yang keempat adalah subyek pemilih sendiri. Pemilih sebagai salah satu faktor dalam partisipasi ditentukan banyak hal, diantaranya adalah tingkat pendidikan, tingkat kesadaran politik, kemudahan akses terhadap pemilu, jenis kelamin, ideologi pemilih, serta tingkat ekonomi pemilih.

Dari keempat faktor tersebut ada dua faktor yang menurut peneliti akan sangat berpengaruh besar terhadap kualitas dan kuantitas pemilu yang berlangsung. Kedua faktor utama tersebut adalah partai politik dan calon. Kedua hal ini akan berpengaruh terhadap realitas lapangan di masyarakat. Semakin baik kinerja dari parpol dan calon, maka akan semakin berkualitas, tetapi sebaliknya, apabila parpol dan calon ini “bermain” menggunakan hal-hal negatif, dengan money politik misalnya, maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil partisipasi dan pilihan masyarakat.

Di Jawa Tengah, pada wilayah dengan PDRB rendah ini, peneliti menemukan, bahwa masyarakat masih rentan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Artinya, faktor ekonomi yang dialami masyarakat menjadi celah untuk dimainkan dalam mendulang suara dari calon ataupun partai politik tertentu. Tentu saja, pada wilayah dengan PDRB rendah, maka akan diketahui semakin banyak masyarakat dengan ekonomi yang juga rendah. Apabila keadaan ini dimanfaatkan oleh calon atau partai politik maka hasilnya akan sangat luar biasa, masyarakat pada wilayah dengan PDRB rendah ini akan semakin mudah diarahkan untuk memilih calon tertentu dan memilih partai politik tertentu.

Survey dan penelitian yang dilakukan KPU daerah setempat juga turut mendukung kesimpulan ini. Bahwa wilayah dengan PDRB rendah pemilihnya akan mudah dipengaruhi oleh iming-iming harta benda. Seperti yang terjadi di kabupaten Demak. Kesimpulan dari penelitian KPU kabupaten Demak pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 adalah partisipasi pemilih sedemikian besar telah berhasil melampaui target yaitu sebanyak 78 persen. Besarnya animo masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum di Indonesia merupakan bukti bahwa kesadaran masyarakat untuk mengikuti pemilu semakin membaik. Satu sisi hal itu menggemberikan namun hasil survei menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang masuk kategori pemilih transaksional (memilih karena imbalan uang/barang) masih besar yaitu 52 persen, sedangkan pemilih emosional (memilih karena ikatan separtai, seormas, sekeluarga, sekomunitas) juga masih tinggi yaitu 33 persen, adapun yang masuk kategori pemilih rasional (memilih karena visi, misi dan program kerja) cuma 15 persen.

Survei yang dilakukan di kabupaten Pekalongan juga mengakui masih tingginya politik uang yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu. Pada kabupaten Pekalongan, hasil penelitian menyebutkan literasi politik berbanding lurus dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Hubungan literasi politik dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah saling mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat literasi (melek politik) maka semakin tinggi dan berkualitas sebuah partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Oleh karenanya, penelitian ini merekomendasikan dibutuhkan model pengembangan partisipasi masyarakat sehingga melahirkan Pemilu yang lebih baik dan berkualitas. Hal ini karena masyarakat/responden menganggap masih banyaknya praktek pelaksanaan Pemilu (selama ini) yang masih harus diperbaiki. Rendahnya aspek JURDIL dan tingginya praktek politik uang adalah dua hal yang menurunkan

kualitas pelaksanaan Pemilu sekaligus merendahkan mutu dan kualitas partisipasi masyarakat.

Terkait dengan faktor iming-iming dan imbalan, juga seperti yang dihasilkan dari penelitian KPU kabupaten Purworejo. Hasil penelitiannya menyebutkan, tingkat melek politik warga di Kabupaten Purworejo cukup rendah yaitu hanya sebesar 43 persen. Hal yang menarik bahwa ternyata tingkat partisipasi pemilih yang tinggi belum sebanding lurus dengan tingkat melek politik warganya. Pemilih di Kabupaten Purworejo cenderung menggunakan hak pilihnya karena ada faktor imbalan-imbalan tertentu saat di pemilu legislatif maupun pilpres tahun 2014.

Dari fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada daerah dengan PDRB rendah, partisipasi politik masyarakat masih banyak berpartisipasi pada kategori semu (*pseudo participation*). Partisipasi Semu sebenarnya bukan partisipasi, namun dibuat seolah-olah partisipatif. Partisipasi ini digunakan orang luar atau kelompok dominan (elite masyarakat) untuk kepentingannya sendiri, sedangkan masyarakat hanya sekedar obyek.

2. Faktor Partisipasi Politik pada wilayah PDRB sedang

Dari data-data yang disajikan di atas, baik itu data partisipasi Pileg, partisipasi Pilpres, partisipasi Pilgub, dan partisipasi Pilkada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi pada daerah dengan PDRB sedang sulit ditebak. Artinya, tingkat partisipasi tidak diprediksi secara mudah, terkadang tinggi, terkadang rendah. Ini misalnya terjadi hampir rata di seluruh kabupaten dan kota pada wilayah PDRB sedang, saat penyelenggaraan Pileg dan Pilpres, maka partisipasi pemilih cukup tinggi, tetapi bila pelaksanaan Pilgub dan Pilkada, angka partisipasinya akan turun drastis.

Dengan analisis yang sama, peneliti mencoba mengurai faktor-faktor kenapa terjadi hal demikian. Pada wilayah dengan PDRB

sedang terkadang tingkat partisipasi politik masyarakat tinggi, terkadang rendah. Empat hal pokok yang menjadi kunci partisipasi politik pada wilayah ini tetap menjadi pisau analisis yang sama. Keempat hal ini adalah budaya politik pemerintah, partai politik, calon dan pemilih. Budaya politik pemerintah ini adalah berbagai hal dan produk hukum serta peraturan yang mengatur secara teknis partisipasi masyarakat, dalam konteks ini yang mengatur penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu. Partai politik yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat, figur seorang calon dan subyek si pemilih sendiri.

Dari keempat faktor tersebut, pada wilayah dengan PDRB sedang ini, faktor pemilih begitu menentukan. Artinya, pemilih tidak mudah dikendalikan dan dimanfaatkan calon atau partai politik tertentu. Hal ini karena secara ekonomi, wilayah dengan PDRB sedang adalah wilayah transisi menuju pada wilayah dengan PDRB tinggi. Dengan kata lain, pemilih pada wilayah dengan PDRB sedang ini tidak mudah “dibeli” dengan imbalan atau iming-iming ekonomi lainnya.

Artinya, para pemilih atau masyarakat di wilayah dengan PDRB sedang ini semakin sadar dan semakin melek politik. Suara yang dimilikinya tidak mudah diarahkan untuk memilih pada calon tertentu atau partai tertentu. Boleh jadi, para pemilik suara akan menunggu, kira-kira hal apa yang akan menguntungkan bagi dirinya. Boleh jadi mereka akan berbondong-ondong memilih setelah mengerti akan ada manfaat yang besar yang diperolehnya dari calon yang dipilihnya, atau boleh kadi sebaliknya, mereka akan cuek, mereka tidak peduli dengan dilaksanakannya pemilu karena merasa tidak ada untung dan mafaatnya.

Namun tidak semua wilayah demikian, terkadang ada wilayah kabupaten atau kota pada wilayah PDRB sedang yang masyarakatnya mudah diarahkan untuk memilih calon tertentu atau partai politik tertentu. Kabupaten Pati misalnya. Hasil dari survei dan penelitian

yang dilakukan KPU kabupaten Pati menyebutkan: **Pertama**, sikap masyarakat Pati terhadap politik uang bukanlah masalah pengetahuan, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam bentuk suap pada masa pemilihan untuk mempengaruhi *voter* dalam memilih. Strategi untuk mengurangi penggunaan suap dalam pemilihan dengan sosialisasi tidaklah berpengaruh, karena berdasarkan data empiris, faktor kognitif tidak berkorelasi signifikan terhadap keputusan pemilih untuk berpartisipasi atau menentukan pemilihannya.

Kedua, sikap masyarakat Pati terhadap politik uang bukanlah masalah faktor psikologis dan faktor yang terkait dengan *feeling* pemilih. Faktor seperti sosok pribadi calon yang akan dipilih, tidak berkorelasi dalam keputusan *voter* untuk berpartisipasi atau menentukan preferensi politik, yang berkorelasi adalah keberadaan uang itu sendiri.

Ketiga, faktor konatif, atau niat dan tindakan nyata dari responden ketika dihadapkan pada suap untuk menentukan berpartisipasi dan menentukan pilihan merupakan faktor berkorelasi signifikan. Untuk mengurangi praktek suap terhadap *voter* bisa dilakukan dengan memperkuat faktor-faktor yang bisa menekan tindakan nyata dari *voter* untuk menerima suap, seperti membuat faktor situasional dari lingkungan yang secara bersama-sama menyatakan dalam verbal dan tulisan yang dipasang di publik bahwa lingkungan yang bersangkutan menolak adanya suap seperti serangan fajar.

Keempat, hasil perhitungan pada faktor demografi gender menunjukkan bahwa ada perbedaan sikap antara laki-laki dan perempuan, yang mana sikap laki-laki dalam politik uang tidak berkorelasi signifikan dalam keputusan *voter* untuk berpartisipasi dan memilih. Kebalikannya adalah sikap pada perempuan yang mana, sikap perempuan tidak berkorelasi signifikan dalam keputusan

voter untuk berpartisipasi dan memilih. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai sikap penolakan perempuan dalam politik uang seperti suap perlu di tingkatkan nilai- nilai afektif, kognitif dan konatif terhadap perempuan yang ada di Kabupaten Pati.

Dalam pemilihan di kabupaten Pati, jargon khas dari masyarakat Kabupaten Pati yang selama ini sudah mengakar di setiap hajatan pemilihan umum adalah “*ora uwek ora obos*” (tidak ada uang tidak mencoblos atau memilih). Jargon tersebut seolah menjadi cerminan bagaimana tradisi pemilu di kabupaten Pati selalu identik dengan keberadaan politik uang. Akibatnya pola tersebut sudah dianggap sebagai sebuah kewajaran, dan akan menjadi “aneh” manakala dalam kegiatan politik tidak ada politik uang, sehingga siapapun harus menyiapkan dana melimpah jika ingin maju menjadi kontestan politik.

3. Faktor Partisipasi Politik pada wilayah PDRB Tinggi

Pada wilayah dengan PDRB tinggi tingkat partisipasi mulai dari partisipasi Pileg, Pilpres, Pilgub dan Pilkada, diketahui partisipasi masyarakat terhadap politik dengan ditandai partisipasi memilih yang cukup tinggi. Dengan analisis yang sama, peneliti mencoba mengurai faktor-faktor kenapa terjadi hal demikian. Empat hal pokok yang menjadi kunci partisipasi politik pada wilayah ini tetap menjadi pisau analisis yang sama. Keempat hal ini adalah budaya politik pemerintah, partai politik, calon dan pemilih. Budaya politik pemerintah ini adalah berbagai hal dan produk hukum serta peraturan yang mengatur secara teknis partisipasi masyarakat, dalam konteks ini yang mengatur penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu. Partai politik yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat, figur seorang calon dan subyek si pemilih sendiri.

Dari keempat faktor tersebut, pada wilayah dengan PDRB tinggi ini, faktor partai politik dan calon menjadi signifikan bagi pemilih.

Partai politik dan calon yang ada dan akan tampil dalam pertarungan pemilu dan pilkada akan ingin diketahui secara detail oleh calon pemilih. Pada wilayah dengan PDRB tinggi, masyarakat calon pemilih tidak lagi mempan untuk diarahkan memilih calon atau partai tertentu dengan imbalan dan iming-iming harta benda. Para calon pemilih merasa sudah terbebas dari beban ekonomi.

Yang menjadi perhatian justru dari dari Parpao atau calon yang diusung dalam pemilu atau pilkada. Masyarakat yang hal ini calon pemilih akan senantiasa meriset secara detail, visi misi dan kinerja calon yang akan diajukan serta partai politik yang akan dipilihnya nanti. Hal ini dilakukan, karena kepentingan yang dimiliki pemilih, bukan kepentingan figur calon atau partai politik. Apabila calon yang ada itu mendukung kepentingan pemilih, maka akan dengan mudah didukung dan ramai-ramai diangkat untuk dipilih. Tetapi sebaliknya, bila visi misi dan figur calon yang diusung oleh partai tertentu itu justru bertentangan atau bertolak belakang dengan kepentingan yang dimiliki pemilih, maka boleh jadi figur calon tersebut akan dihambat dan dilawan sekuat tenaga. Boleh jadi, figur calon atau partai politik yang dirasa akan menghambat kepentingan pemilih, akan “dibeli” agar tidak mengganggu kepentingan yang dimiliki pemilih.

Dengan kata lain, partisipasi politik pada masyarakat pada wilayah dengan PDRB tinggi adalah Partisipasi Asli (*genuine participation*). Partisipasi asli ini sering juga dikenal dengan nama partisipasi politis, yakni keterlibatan masyarakat di dalam proses perubahan dengan melakukan refleksi kritis dan aksi yang meliputi dimensi politis, ekonomis, ilmiah dan ideologis, secara bersamaan. Pengembangan partisipasi dalam ini adalah pengembangan kekuasaan dan kontrol lebih besar terhadap suatu situasi melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan pilihan kegiatan dan berotonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Jawa Tengah pada klasifikasi wilayah PDRB rendah adalah cenderung tinggi. Tingkat partisipasi politik masyarakat Jawa Tengah pada klasifikasi wilayah PDRB sedang adalah sulit ditebak, terkadang tinggi terkadang rendah. Sedangkan tingkat partisipasi politik masyarakat Jawa Tengah pada klasifikasi wilayah PDRB tinggi adalah cenderung tinggi.

Pada wilayah dengan klasifikasi PDRB rendah, empat hal menjadi penentu tingkat partisipasi, yaitu budaya politik pemerintah, partai politik, calon dan pemilih. Dari keempat faktor tersebut ada dua faktor yang menurut peneliti akan sangat berpengaruh besar terhadap kualitas dan kuantitas pemilu yang berlangsung. Partai politik dan calon menjadi kunci utama partisipasi di masyarakat. Semakin baik kinerja dari parpol dan calon, maka akan semakin berkualitas, tetapi sebaliknya, apabila parpol dan calon ini “bermain” menggunakan hal-hal negatif, dengan money politik misalnya, maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil partisipasi dan pilihan masyarakat. Pada wilayah dengan PDRB rendah ini, masyarakat masih rentan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, sehingga menjadi celah untuk dimainkan dalam mendulang suara dari calon ataupun partai politik tertentu. Dengan kata lain pada daerah dengan PDRB rendah, partisipasi politik masyarakat masih banyak berpartisipasi pada kategori semu (*pseudo participation*). Partisipasi Semu sebenarnya bukan partisipasi, namun dibuat seolah-olah partisipatif. Partisipasi ini digunakan orang luar atau kelompok dominan (elite masyarakat) untuk kepentingannya sendiri, sedangkan masyarakat hanya sekedar obyek.

Pada wilayah dengan klasifikasi PDRB sedang, faktor-faktor yang berpengaruh pada tingkat partisipasi politik masyarakat, adalah masyarakat

pemilih itu sendiri. Pemilih tidak mudah dikendalikan dan dimanfaatkan calon atau partai politik tertentu. Hal ini karena secara ekonomi, wilayah dengan PDRB sedang adalah wilayah transisi menuju pada wilayah dengan PDRB tinggi. Dengan kata lain, pemilih pada wilayah dengan PDRB sedang ini tidak mudah “dibeli” dengan imbalan atau iming-iming ekonomi lainnya. Dengan kata lain, masyarakat di wilayah dengan PDRB sedang ini semakin sadar dan semakin melek politik. Suara yang dimilikinya tidak mudah diarahkan unntuk memilih pada calon tertentu atau partai tertentu.

Sementara pada wilayah dengan klasfikasi PDRB tinggi partai politik dan figur calon menjadi faktor yang signifikan bagi pemilih. Masyarakat selaku pemilih tidak lagi mempan untuk diarahkan memilih calon atau partai tertentu dengan imbalan dan iming-iming harta benda. Visi misi dan kinerja calon dan partai politik akan selalu disorot. Apabila calon yang ada itu mendukung kepentingan pemilih, maka akan dengan mudah didukung dan ramai-ramai diangkat untuk dipilih. Tetapi sebaliknya, bila visi misi dan figur calon yang diusung oleh partai justru bertentangan atau bertolak belakang dengan kepentingan pemilih, maka boleh jadi figur calon tersebut akan dihambat dan dilawan sekuat tenaga. Boleh jadi, figur calon atau partai politik yang dirasa akan menghambat kepentingan pemilih, akan “dibeli” agar tidak mengganggu kepentingan yang dimiliki pemilih. Dalam konteks ini patisipasi politik pada masyarakat dengan wilayah dengan PDRB tinggi adalah Partisipasi Asli (*genuine participation*). Partisipasi asli ini sering juga dikenal dengan nama partisipasi politis, yakni keterlibatan masyarakat di dalam proses perubahan dengan melakukan refleksi kritis dan aksi yang meliputi dimensi politis, ekonomis, ilmiah dan ideologis, secara bersamaan.

B. Saran dan Rekomendasi

Setelah melihat hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana di atas, maka saran dan rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan politik harus terus ditingkatkan kepada seluruh elemen masyarakat agar partsipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya

politik dapat terus meningkat. Dalam kaitan dengan ini, mengingat faktor yang berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakat itu ada partai politik dan calon, maka rumusan pendidikan politik juga harus bergeser kepada pendidikan politik pada pengurus parpol dan calon, dengan tidak mengesampingkan pendidikan politik masyarakat. Artinya, partai politik dan calon harus juga mendapatkan pendidikan politik yang baik, sehingga pada akhirnya partai politik akan semakin berkualitas dan tercipta para pemimpin yang baik dan hebat dalam pengelolaan negara dan daerah untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

2. Pada dasarnya, negara mempunyai tugas menyejahterakan rakyatnya secara dhalim dan batin. Negara wajib menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil, mendistribusikan kekayaan negara secara merata kepada rakyat, sehingga tidak terjadi konsentrasi perputaran modal diantara mereka yang kaya saja. Negara harus memastikan bahwa sumber daya (*resources*) yang ada dikelola untuk sebesar-besarnya memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Oleh karena itu, negara harus menciptakan struktur ekonomi yang sehat dan adil dalam tatanan politik yang bersih. *Resources* diprioritaskan untuk menutup kebutuhan *dharuriyat* (*necessities*), dan hanya surplus *resources* yang dicurahkan untuk hal-hal yang *hajiyyat* (*comforts*) dan hal-hal yang *tahsiniyyat* (*luxuries*).
3. Rakyat harus diberi akses yang sama untuk mengakses sumber daya alam, memproduksi, mendistribusi, dan mengambil keuntungan dari modal tersebut, asal dilakukan secara fair, adil, dan tidak menimbulkan mafsadah, baik secara mikro ataupun makro.
4. Negara maupun rakyat harus sama-sama merevolusi mentalnya masing-masing. Negara harus berkomitmen tinggi untuk menjadi pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan konsisten memerangi segala tindakan yang menjadi virus bagi penyehatan ekonomi Nasional. Sementara rakyat harus meningkatkan kreativitas dan kapasitasnya. Tentu, lagi-lagi

negara harus turun tangan mendampingi mereka, melindungi, mendidik, meningkatkan skill dan memberinya akses yang luas terhadap permodalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselem Strauss & Juliet Carbin, 1990, *Basic Of Qualitative Research*, California: Sage Production
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah , 2015, *Jawa Tengah dalam Angka 2015*, BPS Prov Jawa Tengah
- Bismar Arianto, 2011, “Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu”. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. I, No. 1
- Dedi Supriadi Adhuri, *Penelitian Kualitatif: Teknik Penelitian, Masalah Reliabilitas-Validitas dan Analisis Data*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI), Paper Pelatihan Penelitian Kualitatif, Solo, 13 Oktober 2007.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks. Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita
- Henry B. Mayo, 1960, *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press
- Huff, 2002, “The Challenge of Fundamentalism for Interreligious Dialogue,” *Cross Current* (Spring-Summer, 2002)
- Jack R. Fraenkel & Norman E Wallen, 1993, *How to Design and Evaluative Research in Educations*, New York: Megrow Hill Inc
- Jerome Kirk dan Marc L. Miller, 1986, *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills: Sage Publication
- Kartini Kartono, 1990, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju
- KPU Demak, 2015, *Evaluasi Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Legislatif Dan Presiden Tahun 2014 Serta Menyongsong Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2015*, Demak

- Lexy J. Moeliong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Rusda Karya
- Marzuki, 2005, *Metodologi Riset; Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Yogyakarta: EKONISA
- Matthew B. Miles; A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohandi, Jakarta: Universitas Indonesia
- Michael Quinn Patton, 1987, *Qualitative Evaluation Methods*, New York: Beverly Hills, hlm. 132.
- Michael Rush & Phillip Althoff, 2002, *Pengantar Sosiologi Politik*, Cet. 9, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, ed. revisi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- _____, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Muhammad Banowo, 2008, *Persepsi dan Perilaku Pemilih terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk*, Tesis (tidak dipublikasikan), Program Pascasarjana UNS: Surakarta
- Muhammad Iskandar, Linda Sunarti dan Abdurrahman, 20013, *Sejarah Indonesia dalam Perkembangan Zaman*, Jakarta: Bumi Aksara
- Noeng Muhajir, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakerarasin
- Oakley, Peter, et al. 1991. *Projects With People, The Practice Of Participation in Rural Development*, Geneva : International Labour Office
- Olivier Roy, 1994, *The Failure of Political Islam*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
- Pawito, 2009, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, Yogyakarta

- Robert A. Dahl, 1998, *On Democracy*, USA; Yale University Press
- S. Nasution, 2003, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sahidin, 2004, *Kala Demorasi Melahirkan Anarki; Potret Tragedi politik di Dongos*, Yogyakarta: Logung Pustaka
- Santoso Sastropoetro, 1988, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung
- Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat*, Bandung: Alfabeta
- Soedjono Sastroatmodjo, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang, IKIP Press,
- Soegarda Poerbakawatja, 1981, *Ensiklopedia Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung
- Sudijono Sastroatmodjo, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang, IKIP Semarang Press
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syaiful Arif, 2006, *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*, Malang: Averroes Cipta
- Youssef M Choueiri, 1990, *Islamic Fundamentalism*. Boston: Twayne Publishers